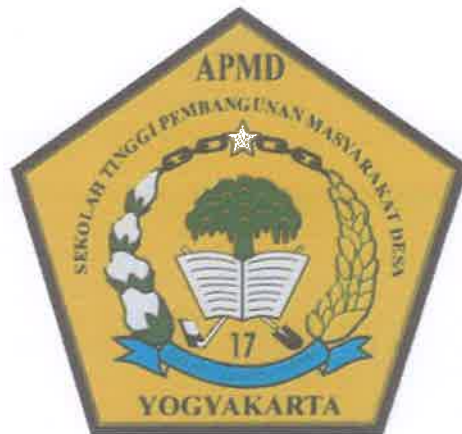


**BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**
*(Penelitian kualitatif dengan pendekatan Eksplanasi di Kalurahan
Widodomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta)*

SKRIPSI



Disusun Oleh :

Kadapi Uamang
17520300

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2024



**BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**
*(Penelitian kualitatif dengan pendekatan Eksplanasi di Kalurahan
Widodomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta)*

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan**



Disusun Oleh :

**Kadapi Uamang
17520300**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :


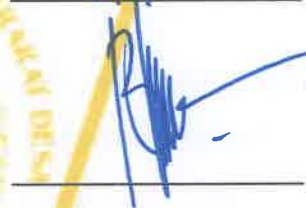

Hari : Rabu

Tanggal : 28 Februari 2024

Jam : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
<u>Dr. Rijel Samaloisa</u> Ketua Penguji / Pembimbing	
<u>Analius Giawa, S.IP., M.Si</u> Penguji Samping I	
<u>Utami Sulistiana, S.P., M.P</u> Penguji Samping II	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan




Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kadapi Uamang

Nim : 17520300

Progam Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN** (*Penelitian kualitatif Dengan pendekatan Eksplanasi di Kalurahan Widodomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta*) adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Juli 2024

Yang Menyatakan



Kadapi Uamang
17520300

MOTTO

“Jangan menilai saya dari kesuksesan, tetapi nilai saya dari seberapa sering saya jatuh dan berhasil bangkit kembali”.

(Nelson Mandela)

“Mintalah, Maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan di bukakan bagimu”.

(Matius 7:7)

"Hidup adalah perjalanan, jadi nikmati setiap langkahnya dan prosesnya.

(Kadapi Uamang)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan segala karunia-Nya yang dilimpahkan sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi) untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata (1) Di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “ APMD” Yogyakarta.

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia saya juga mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang membantu dan memberikan dukungannya kepada saya baik secara langsung maupun tidak langsung, selama saya menempuh pendidikan diperguruan tinggi. Oleh karena itu, Karya Tulis ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan berkat, kesehatan, rezeki serta penyertaan dan perlindungan-Nya kepada saya selama menempuh pendidikan di tanah rantau.
2. Skripsi atau tugas akhir ini saya persembahkan kepada orang tuaku Alm. mama Demiana Natkime dan bapa Servianus Uamang tercinta, yang telah membersarkan, mendidik dan memberikan motivasi kepada saya selama ini. Terima kasih banyak atas pengorbanan serta Doa kalian berdua, bagi saya persembahkan sarjana ini tidak cukup untuk membalas jasa kalian, tetapi doakanlah semoga anakmu dapat menjadi anak yang berbakti dan menjadi panutan dalam keluarga.
3. Kepada om tercinta Titus Natkime yang mana selalu memberikan dukungan doa tanpa batas juga dukungan secara moril maupun non moril dalam setiap proses saya menempuh pendidikan di Yogyakarta.
4. Untuk om Selyanus Natkime, made Jean V, Waly, Pade Yoel Magai dan kka Agus Magai, Terima kasih atas semangat dan dukungannya selama ini baik moril maupun materil dan dorongan kalian kepada saya untuk menggapai gelar Sarjana (S1) di Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang tak terhingga penulis haturkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas akhir Skripsi yang berjudul **“BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN”**. (Penelitian kualitatif dengan pendekatan Eksplanasi di Kalurahan Widodomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta) Skripsi Ini Penulis susun untuk Memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana S1 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara materi maupun moral. maka penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapa Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si., Selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
2. Bapa Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Bapa Dr. Rijel Samaloisa Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberi masukan baik dalam penyusunan skripsi atau motivasi lainnya sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan lancar.
4. Kepada kedua orang tua saya Alm.bapa dan ibu yang selalu mendoakan saya sehingga saya mampu dalam menyelesaikan Skripsi.
5. Kepada Bapa dan Ibu dosen seluruh civitas akademik Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD “APMD” Yogyakarta.
6. Kepada sahabat-sahabat saya Samran Murib, Jefri Tabuni, Puren Tabuni, om Nelson Natkime, dan Nupsy Magai Serta adik-adik yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuan doa, nasehat, hiburan dan semangat yang kalian berikan dalam proses untuk menyelesaikan skripsi ini, tak akan saya lupakan kebaikan kalian semua.

7. Untuk para Senior, adik-adik serta teman-teman seperjuangan saya di honai IPMAMI dan IPMAP terima kasih banyak telah menjadi rumah, keluarga bagi saya di tanah rantau serta mendidik dan membentuk saya secara pribadi yang terampil dan kuat, secara fisik maupun mental dan terima kasih atas setiap dukungan dan doanya.
8. Untuk Theys Mandosir, Rudi.Rumbruren, Dusel, Aldo Warfandu, Bondan, Terima kasih banyak untuk segala bantuan, nasehat serta canda tawa di parkiran borjo timoho dan disetiap sudut-sudut halaman kampus “APMD”.
9. Terima kasih untuk kawan-kawan seperjuangan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2017 STPMD”APMD” Yogyakarta. yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
10. Untuk Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “ APMD” Yogyakarta.

Dalam penulisan Skripsi ini, Penulis menyadari betul akan segala kekurangan yang ada. Oleh karena itu, penulis berterima kasih bila mana ada masukan, kritik dan juga saran yang bersifat membangun dari pembaca sehingga penulis dapat menjadikan semua itu sebagai bahan acuan untuk penyempurnaan tulisan skripsi yang lebih baik.

Yogyakarta 19 Juli 2024
Penulis

Kadapi Uamang

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
INTISARI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Fokus Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Literatur Review	6
G. Kerangka Konseptual.....	14
1. Budaya Organisasi	14
2. Tata Kerja Struktur Pemerintah Kalurahan.....	18
H. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian dan Metode Penelitian.....	20
2. Unit Analisis	21
3. Teknik Pengumpulan Data.....	23
4. Teknik Analisis Data.....	26
BAB II PROFIL KALURAHAN WIDODOMARTANI.....	29
A. Sejarah Kalurahan Widodomartani.....	29
B. Keadaan Geografis.....	30
C. Keadaan Demografis	33
1. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur	34
2. Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	35
3. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	35
4. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan	37
D. Keadaan Sarana dan Prasarana	38

1. Sarana dan Prasarana Keagamaan	38
2. Sarana dan Prasarana Kependidikan.....	38
3. Sarana dan Prasarana Kesehatan.....	39
4. Sarana dan Prasarana Olahraga.....	39
E. Visi dan Misi	40
1. Visi Kalurahan Widodomartani	40
2. Misi Kalurahan Widodomartani	40
F. Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan Widodomartani	41
G. Potensi dan Masalah	45
H. Strategi Pembangunan Kalurahan.....	50
1. Strategi Pembangunan Kalurahan.....	50
2. Kebijakan Pembangunan Kalurahan.....	53
3. Prioritas Pembangunan Kalurahan.....	57
4. APBDES Kalurahan Widodomartani	62
5. Data Aset Desa.....	69
BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA	73
A. Pengaruh Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Kalurahan	73
B. Manfaat Penyelenggraan Pemerintahan Dalam Membentuk Budaya Organisasi	83
C. Kerjasama Antara Elemen Pemerintah Kalurahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Budaya Organisasi	95
BAB IV PENUTUP	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111
PEDOMAN WAWANCARA	113

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Data Informan Kalurahan Widodomartani.....	22
Tabel 2. 2 Pembagian Wilayah Administratif Kalurahan Widodomartani	32
Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur	34
Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	36
Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan	37
Tabel 2. 6 Sarana dan Prasarana Keagamaan.....	38
Tabel 2. 7 Sarana dan Prasarana Kependidikan	38
Tabel 2. 8 Sarana dan Prasarana Kesehatan.....	39
Tabel 2. 9 Sarana dan Prasarana Olahraga.....	39
Tabel 2. 10 Pendapatan Kalurahan Widodomartani	63
Tabel 2. 11 Belanja Kalurahan.....	64
Tabel 2. 12 Penggunaan Dana Desa.....	66
Tabel 2. 13 Aset Tanah Desa	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Kalurahan Widodomartani	32
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Desa.....	43
Gambar 2. 3 APBDes Kalurahan Widodomartani	62

INTISARI

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kalurahan di Indonesia. Undang-Undang Kalurahan memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah kalurahan dalam mengelola sumber daya dan menyelenggarakan pembangunan di wilayahnya. Meskipun Undang-Undang Desa memberikan pijakan yang kuat bagi otonomi desa/kalurahan, efektivitas implementasinya tergantung pada sejumlah faktor, termasuk budaya organisasi di dalam pemerintah kalurahan. Pemerintah kalurahan, sebagai unit pelaksana Undang-Undang Desa, memiliki tugas dan tanggung jawab yang luas untuk memastikan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel. Budaya organisasi di dalam pemerintah kalurahan menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan tugas tersebut. Sebagai suatu entitas yang hidup, budaya organisasi mencerminkan nilai-nilai, norma, dan perilaku yang membentuk cara kerja dan interaksi antaranggota pemerintahan kalurahan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksplanasi melalui observasi, wawancara dan dokumentasi untuk menganalisis data dengan fokus pada Kalurahan Widodomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah .Istimewa.Yogyakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif eksplanasi dengan unit analisis melibatkan Kalurahan Widodomartani, objek penelitian berfokus pada budaya organisasi terhadap kinerja pemerintah kalurahan, dan subjek/informan penelitian melibatkan Lurah, Pamong Kalurahan, dan masyarakat setempat.

Temuan penelitian dapat dirangkum dalam tiga poin utama. Pertama, budaya organisasi di Kalurahan Widodomartani memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah kalurahan. Perspektif holistik, variabel, dan kognitif dalam budaya organisasi membentuk pandangan dan tindakan kolektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kalurahan. Kedua, penyelenggaraan pemerintahan memiliki peran penting dalam membentuk dan memperkuat budaya organisasi, menciptakan identitas, meningkatkan komitmen, dan memberikan landasan untuk stabilitas sosial. Ketiga, budaya organisasi membentuk dasar untuk kerjasama antara elemen pemerintah kalurahan, memudahkan terbentuknya kerjasama harmonis dan efektif.

Kata kunci: Budaya Organisasi, Kinerja Pemerintah, Pemerintah Kalurahan, Penyelenggaraan Pemerintah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi “angin segar” bagi desa atau kalurahan, di mana diharapkan pemerintah kalurahan dapat mengatur urusan kalurahannya dengan lebih baik dan mandiri. Pasal 26 ayat 2, menekankan bahwa pemerintah kalurahan memiliki wewenang untuk mengatur, membina dan memimpin kalurahan agar dapat mensejahterakan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pemerintah kalurahan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam mengelola segala anggaran kalurahan dan juga pengawasan yang intens dalam menjalankan Undang-Undang ini baik dari pemerintah daerah setempat dan juga dari masyarakat kalurahan, agar penggunaan dana alokasi dapat teralokasikan dengan baik dan dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat kalurahan. Undang-Undang Kalurahan secara umum mengatur materi mengenai asas pengaturan, kedudukan dan jenis kalurahan, penataan kalurahan, kewenangan kalurahan, penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, hak dan kewajiban kalurahan dan masyarakat kalurahan, peraturan kalurahan, keuangan kalurahan dan aset kalurahan, pembangunan kalurahan dan pembangunan kawasan perkalurahanan, badan usaha milik kalurahan, kerja sama kalurahan, lembaga kemasyarakatan kalurahan dan lembaga adat kalurahan, serta pembinaan dan pengawasan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kalurahan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa atau Kalurahan memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah kalurahan dalam mengelola sumber daya dan menyelenggarakan pembangunan di wilayahnya. Meskipun Undang-Undang Desa memberikan pijakan yang kuat bagi otonomi desa atau kalurahan, efektivitas implementasinya tergantung pada sejumlah faktor, termasuk budaya organisasi di dalam pemerintah kalurahan. Pemerintah kalurahan, sebagai unit pelaksana Undang-Undang Desa, memiliki tugas dan tanggung jawab yang luas untuk memastikan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel. Budaya organisasi di dalam pemerintah kalurahan menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan tugas tersebut. Sebagai suatu entitas yang hidup, budaya organisasi mencerminkan nilai-nilai, norma, dan perilaku yang membentuk cara kerja dan interaksi antaranggota pemerintahan kalurahan.

Budaya organisasi adalah salah satu faktor yang perlu dibangun di pemerintahan, mulai dari Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Kota dan Kabupaten, bahkan juga di pemerintahan Desa di Indonesia. Melalui sosialisasi, pelaksanaan dan penetapan budaya organisasi lah suatu jalannya roda pemerintahan dapat diharapkan mampu memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat dimana Pemerintahan itu dijalankan. Sosiohumaniora, Volume 15, No. 1, Maret 2013 : 26 -34. jurnal.unpad.ac.id.

Menurut Sobirin (2007) bahwa budaya organisasi adalah pola keyakinan dan nilai-nilai yang dipahami serta dijiwai oleh anggota organisasi sehingga pola tersebut memberikan makna tersendiri bagi organisasi yang bersangkutan dan menjadi dasar aturan berperilaku dalam organisasi. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai yang menjadi pedoman dan acuan anggota organisasi untuk menghadapi berbagai permasalahan baik eksternal maupun usaha penyesuaian integrasi ke dalam perusahaan sehingga masing-masing anggota organisasi harus memahami nilai-nilai yang ada untuk mengimplementasikan dan cara bertingkah laku atau berperilaku. Dengan demikian, pembentukan budaya organisasi dimulai dari tahap pem ide dan diikuti oleh adanya organisasi. Meski pada tahap pembentukan ide organisasi tersebut belum menjadi kenyataan atau ada wujudnya secara fisik, tahap ini menjadi dasar terbentuknya budaya organisasi. Budaya organisasi baru menjadi kenyataan ketika sebuah organisasi sudah benar-benar berdiri. Dapat dikatakan bahwa ketika organisasi berdiri, pembentukan budaya organisasi pun ikut dimulai.

Kalurahan Widodomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai objek penelitian, menjadi representasi dari kerangka hukum Undang-Undang Kalurahan di tingkat lokal. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap bagaimana budaya organisasi di pemerintah kalurahan ini dapat mendukung atau menghambat implementasi Undang-Undang Kalurahan sangat penting. Dengan mengaitkan penelitian ini dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, diharapkan hasil penelitian

dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang peran budaya organisasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pemerintah kalurahan sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut. Pemahaman ini, pada gilirannya, dapat menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan kalurahan sesuai dengan semangat Undang-Undang Kalurahan.

Oleh karena itu, pemerintahan kalurahan sebagai entitas pemerintahan tingkat lokal memiliki peran sentral dalam menjalankan tugas dan fungsi yang mengarah pada pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, budaya organisasi di pemerintah kalurahan menjadi faktor yang dapat membentuk perilaku, nilai, dan norma kerja anggota organisasi. Budaya organisasi dapat memengaruhi kinerja pemerintah kalurahan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang efisien dan efektif. Penelitian ini akan difokuskan pada Kapanewon Widodomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai studi kasus untuk mengeksplorasi hubungan antara budaya organisasi dan kinerja pemerintah kalurahan. Pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih baik tentang cara meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan kalurahan di tingkat lokal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pemerintah Kalurahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan?

C. Fokus Penelitian

1. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Kalurahan.
2. Manfaat Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Membentuk Budaya Organisasi.
3. Kerjasama Antara Elemen Pemerintah Kalurahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Budaya Organisasi.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis budaya organisasi pemerintahan kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan: tujuan ini akan mencakup pemahaman tentang budaya organisasi dalam tubuh pemerintah kalurahan.
2. Mengidentifikasi setiap permasalahan yang ada dalam pemerintah kalurahan terkait dengan budaya organisasi dalam penyelenggaraan pemerintah.
3. Mengkaji regulasi tentang budaya organisasi dalam tata kerja pemerintah kalurahan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah wawasan keilmuan kepada masyarakat kalurahan dan referensi bagi Program Studi Ilmu Pemerintahan melalui deskripsi hasil-hasil penelitian yang ditemukan di lapangan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian sebagai evaluasi yang dijadikan rujukan sebagai bahan masukan untuk Kalurahan Widodomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, DIY sebagai elemen dan aktor dalam memahami budaya organisasi pemerintahan kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif.

3. Manfaat bagi penulis

Manfaat bagi penulis adalah sebagai sarana untuk memperluas pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dalam menambah wawasan berfikir.

F. Literatur Review

1. Jurnal yang diteliti oleh Ahmad Rivai dengan judul Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Budaya organisasi Terhadap Kinerja Karyawan tahun 2020.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan pada PT Federal International Finance – Medan, mengetahui dan menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada PT Federal International Finance – Medan dan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi terhadap

kinerja karyawan pada PT Federal International Finance - Medan. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh karyawan tetap PT Federal International Finance-Medan yang berjumlah 60 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Federal International Finance – Medan dan kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Federal International Finance - Medan. (<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/MANEGGIO>)

2. Jurnal yang diteliti oleh Rayyan Aqila Praditya dengan judul Peran Mediasi Budaya Organisasi dalam Hubungan antara Kepemimpinan Transformasional dan Efektivitas Organisasi: A Mini Review (2022).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki efek dari dimensi kepemimpinan transformasional pada efektivitas organisasi dengan menghormati peran mediasi budaya organisasi. Temuan Review ini menunjukkan bahwa efek ideal variabel pengaruh dan motivasi motivasional terhadap budaya organisasi dan juga pengaruh budaya organisasi terhadap efektivitas organisasi adalah positif dan signifikan serta budaya organisasi memediasi hubungan antara kepemimpinan transformasional dan organisasi efektivitas. Mengingat bahwa metode tradisional manajemen dan kepemimpinan, dalam kondisi yang berubah dan dinamis saat ini, kurang efektifitas, sehingga terjadi perubahan gaya

kepemimpinan manajer dan penggunaan kepemimpinan transformasional diperlukan untuk mencapai organisasi efektivitas.

3. Jurnal yang diteliti oleh Sudarsono dengan judul Budaya Organisasi (2020). Budaya organisasi adalah perangkat sistem nilai-nilai (*values*), keyakinan-keyakinan (*beliefs*), asumsi-asumsi (*assumptions*), atau sebuah norma yang sudah berlaku, disepakati dan diikuti sumber daya manusia di sebuah organisasi sebagai prinsip atau pedoman dan pemecahan masalah yang timbul di sebuah organisasi. Dalam membangun budaya organisasi tentu masing-masing organisasi apapun jenis dan level organisasi memiliki pengalaman yang berbeda pada beberapa keadaan dan memiliki sebuah persamaan dalam keadaan tertentu. Hal ini, menandakan adanya dinamisasi dalam sebuah organisasi dalam membangun budaya organisasi sebagai pedoman dan prinsip setiap individu di sebuah organisasi dalam menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing untuk mensukseskan tujuan organisasi dibangun. Budaya organisasi lahir dari proses panjang dimulai sejak awal pendirian organisasi sampai ke fase pembentukan dan ke fase kesuksesan. Sebuah perjalanan panjang tersebut, baik perjalanan yang berupa kegagalan dan kesuksesan merupakan perjalanan yang kemudian dijadikan pijakan dalam membangun budaya organisasi.
4. Jurnal yang diteliti oleh Hendra dengan judul Pengaruh Budaya Organisasi, Pelatihan Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Universitas Tjut Nyak Dhien Medan (2020). Penelitian ini membahas tentang Pentingnya peran sumber daya manusia dalam mencapai kinerja organisasi dengan

kemampuan yang dimiliki sumber daya manusianya. Artinya kemampuan sumber daya manusia harus benar-benar teruji sehingga mampu mengerjakan semua pekerjaan yang dibebankan kepadanya secara benar dan menghasilkan kinerja yang sempurna, baik kuantitas maupun kualitasnya. Di samping itu, pekerjaan haruslah dimotivasi secara terus-menerus agar tetap semangat untuk melakukan pekerjaannya. Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain faktor budaya, pelatihan dan motivasi kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi, pelatihan dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada Universitas Tjut Nyak Dhien. Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial budaya organisasi, pelatihan, dan motivasi memiliki pengaruh terhadap kinerja. Secara simultan budaya organisasi, pelatihan dan motivasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizal Al Hairri dengan judul Budaya Organisasi Dan Dampaknya Terhadap Lembaga Pendidikan (2021). Penelitian ini membahas tentang budaya organisasi menjadi fondasi terbentuknya sebuah organisasi, dikarenakan budaya organisasi adalah jati dirinya sebuah organisasi. Ada beberapa pendapat tentang pengertian budaya organisasi, pendapat yang paling populer yaitu budaya organisasi adalah pokok penyelesaian masalah-masalah eksternal dan internal. Dapat

dipahami bahwa organisasi didirikan untuk menyelesaikan suatu masalah. Sebuah pendidikan biasanya memiliki sebuah organisasi. Organisasi dalam pendidikan memiliki peran-peran yang dapat membantu penunjang kualitas pendidikan. Diantara peran-peran tersebut salah satunya yaitu membantu peranan pengajar dalam meningkatkan kualitas SDM bagi para pelajar. Organisasi adalah komponen penting dalam kehidupan, terutama dalam lingkup pendidikan. Maka dari itu, patut disyukuri dengan adanya sebuah organisasi dalam kehidupan. Tanpa organisasi, mungkin umat manusia akan kesulitan dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Anas Triyanto dengan Judul Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Komitmen Organisasi Pada Pegawai Kantor Camat (2020). Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh budaya organisasi terhadap komitmen organisasi pada staf kantor distrik Rasanae Timur. Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini yang menunjukkan hubungan sebab dan akibat. Sampel yang digunakan adalah karyawan. Observasi, kuesioner, dan dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana menggunakan perangkat lunak IBM SPSS 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: komitmen organisasi pada staf kantor distrik Rasanae Timur. (<http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jim>)
7. Penelitian yang dilakukan oleh Intan Maharani dengan judul Pengaruh Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi, Kompensasi, Dan Etos Kerja

Terhadap Kinerja Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (2017).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh budaya organisasi, komitmen organisasi, kompensasi, dan etos kerja terhadap kinerja pegawai Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang terdiri dari 162 pegawai. Dengan menggunakan rumus Slovin, sampel dalam penelitian ini terdiri dari 115 responden. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi, komitmen organisasi, kompensasi, dan etos kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Edi Sugiono dengan judul Analisis Pengaruh Kepemimpinan, Budaya Organisasi dan Komunikasi Terhadap Kepuasan Kerja Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Karyawan (2021).

Penelitian ini menganalisis pengaruh kepemimpinan, budaya organisasi, dan komunikasi terhadap kepuasan kerja dan dampaknya pada kinerja karyawan di PT. Usaha Makalingga Mandiri, Jakarta. Penelitian dilakukan menggunakan metode survei, sampel, dan kuesioner sebagai alat pengumpulan data utama, dengan 100 responden sebagai subjek. Metode analisis menggunakan Structural Equation Model (SEM) untuk pengujian

hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kepemimpinan, Budaya Organisasi, dan Komunikasi secara langsung berpengaruh positif terhadap Kepuasan Kerja. 2) Kepemimpinan, Budaya Organisasi, dan Komunikasi berpengaruh positif atau tidak langsung terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja sebagai variabel mediasi. 3) Kepuasan Kerja sebagian memediasi pengaruh Kepemimpinan, Budaya Organisasi, dan Komunikasi terhadap Kinerja Karyawan. 4) Kepemimpinan adalah variabel dengan pengaruh terbesar terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Peningkatan kepuasan kerja akan berdampak pada peningkatan kinerja karyawan. (<https://ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/JMSAB>).

9. Penelitian yang dilakukan oleh Muhizan Tamimi dengan judul Budaya Organisasi dan Kinerja Karyawan: Systematic Literature Review (2022). Systematic literature review ini bertujuan untuk mensintesis beberapa penelitian yang berkaitan dengan pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini disusun menggunakan Preferred Reporting Item for Systematic Review and Meta Analysis dari penelitian yang memiliki kaitan dengan pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Metode pengumpulan data menggunakan metode Population, Intervention, Comparison, and Outcome dengan menggunakan 2 akses yaitu Google Cendikia dan Garba Rujukan Digital (garuda). Sejumlah 144 data disaring menggunakan kriteria inklusi data sehingga didapatkan sejumlah 33 data yang sesuai dengan standar kelayakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 17 data dengan pengaruh positif dan

signifikan serta mendominasi pengaruh dibandingkan dengan variabel lain, 13 data dengan pengaruh positif dan signifikan namun tidak mendominasi, 1 data dengan pengaruh negatif dan signifikan, serta 2 data menunjukkan pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan melalui variabel mediasi. (<https://doi.org/10.54099/hbr.v2i2.100>).

10. Penelitian yang dilakukan oleh Nihayatul Fadlilah dengan judul Studi Kausal Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan (2019).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis studi kausal budaya organisasi, komitmen organisasi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan survey. Data diambil melalui teknik sample random sampling (teknik acak sederhana) dari jumlah populasi 3500 karyawan dan diambil sampel populasi 10% yaitu 98 karyawan. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, sedangkan analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda. Dan pengolahan data menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan, terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan dan tidak terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Berarti secara simultan budaya organisasi, dan motivasi kerja tidak berpengaruh sedangkan komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan.

G. Kerangka Konseptual

1. Budaya Organisasi

Budaya merupakan konsep dasar dalam antropologi, Kluckhohn (Pace;1998:90) mengemukakan konsep Budaya yang diterapkan dalam organisasi yaitu:

- a. Perspektif holistik, perspektif ini memandang budaya sebagai cara-cara terpola mengenai berpikir, menggunakan perasaan dan bereaksi.
- b. Perspektif Variabel, perspektif ini terpusat pada bagaimana budaya diekspresikan.
- c. Perspektif Kognitif, perspektif ini menegaskan gagasan, konsep, cetak biru, keyakinan, nilai dan norma “pengetahuan yang diorganisasikan” yang ada dalam pikiran orang-orang untuk memahami realitas.

Berdasarkan konsep budaya yang dikemukakan oleh Kluckhohn (Pace; 1998:90) dalam konteks "Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Kalurahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan," dapat ditarik beberapa simpulan. Budaya organisasi di Kalurahan Widodomartani dapat dipahami melalui tiga perspektif. Pertama, perspektif holistik melibatkan cara-cara terpola dalam berpikir, menggunakan perasaan, dan bereaksi secara keseluruhan. Dalam hal ini, budaya organisasi mencakup nilai-nilai, norma-norma, dan tata nilai yang membentuk pandangan kolektif anggota organisasi terhadap kinerja pemerintah kalurahan. Kedua, perspektif

variabel menyoroti bagaimana budaya diekspresikan. Simbol-simbol, ritus, dan praktik-praktik sehari-hari di dalam organisasi dapat memberikan gambaran tentang pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pemerintah kalurahan. Ketiga, perspektif kognitif menekankan pemahaman bersama mengenai gagasan, konsep, cetak biru, keyakinan, nilai, dan norma dalam pikiran anggota organisasi. Dalam konteks ini, pemahaman bersama ini dapat membentuk landasan budaya organisasi yang memengaruhi kinerja pemerintah kalurahan.

Selain itu, budaya organisasi juga mempunyai beberapa fungsi, seperti yang dikemukakan oleh Robbins (2003:311) :

- a. Budaya mempunyai peran menetapkan tapal batas yakni menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi lainnya.
- b. Budaya membawa suatu identitas bagi anggota-anggota organisasi.
- c. Budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas dari pada kepentingan diri pribadi.
- d. Budaya meningkatkan kemantapan sistem sosial, merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk apa yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para pegawai.
- e. Budaya berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang membantu dan membentuk sikap serta perilaku para pegawai.

Oleh karena itu, Budaya organisasi, menurut Robbins (2003:311), memiliki beberapa fungsi yang relevan dalam konteks penelitian "Budaya

Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Kelurahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan."Pertama, budaya organisasi memiliki peran penting dalam menetapkan tapal batas, menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan yang lain. Ini memberikan identitas unik pada suatu organisasi, memungkinkan pengenalan dan pemahaman yang khusus terhadap entitas tersebut. Fungsi kedua adalah memberikan identitas bagi anggota organisasi. Budaya organisasi membantu membangun rasa keanggotaan dan menandai perbedaan individu di dalam kerangka kerja organisasi yang lebih besar. Selanjutnya, budaya organisasi memudahkan timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas dari pada kepentingan diri pribadi. Dengan menciptakan nilai bersama dan tujuan yang dibagikan, budaya organisasi dapat menghasilkan keterlibatan dan komitmen anggota terhadap pencapaian tujuan bersama. Fungsi keempat adalah meningkatkan kemantapan sistem sosial. Sebagai perekat sosial, budaya organisasi memberikan standar-standar yang tepat untuk interaksi di dalam organisasi, menciptakan fondasi yang kuat untuk kerja sama dan harmoni. Terakhir, budaya organisasi berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali. Melalui pedoman yang diberikan, budaya membentuk sikap dan perilaku pegawai, menciptakan konsistensi dan koherensi dalam tindakan organisasional.

Menurut Widiyarta (2017) Budaya organisasi merupakan sebuah sistem yang memiliki arti yang dianut oleh setiap anggota yang dijadikan sebagai pembeda organisasi yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan

budaya organisasi termasuk dalam budaya etika dimana di dalam konsep budaya tersebut dapat mewakili satu interaksi yang multi dimensi serta di dalamnya terdapat sistem kontrol bagi perilaku pihak formal dan informal yang dapat mempromosikan budaya etis organisasi.

Dengan demikian, Widiyarta (2017), memberikan perspektif bahwa budaya organisasi diartikan sebagai suatu sistem yang membawa makna dan nilai yang dipegang oleh setiap anggota, menjadi pembeda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Budaya organisasi tidak hanya bersifat formal, melainkan juga diinternalisasi oleh individu dalam organisasi, menciptakan identitas bersama dan rasa keanggotaan. Pentingnya budaya organisasi sebagai pembeda antar organisasi menekankan bahwa setiap entitas organisasional memiliki karakteristik khas yang membentuk identitasnya sendiri. Budaya organisasi, dalam perspektif ini, menciptakan keunikan dan membedakan satu organisasi dengan yang lain. Lebih lanjut, Widiyarta menyoroti bahwa budaya organisasi termasuk dalam budaya etika, menciptakan interaksi multi dimensi dan sistem kontrol bagi perilaku pihak formal dan informal. Hal ini menunjukkan bahwa budaya organisasi tidak hanya memberikan arahan nilai, tetapi juga membentuk dasar etis yang mampu mempromosikan perilaku etis di berbagai tingkatan organisasi. Dengan demikian, pandangan ini membuka ruang untuk penelitian lebih lanjut yang dapat menjelajahi hubungan antara budaya organisasi, identitas organisasi, etika organisasi,

dan pengaruhnya terhadap perilaku formal dan informal di dalam konteks kinerja pemerintah kalurahan.

2. Tata Kerja Struktur Pemerintah Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1, pemerintahan Desa ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Latar belakang berdirinya sebuah pemerintahan desa di sebuah wilayah hakekatnya ialah sebagai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya, atau sebagai unsur pemerintah yang melayani masyarakatnya. Dalam proses pemenuhan kebutuhan dasar tentunya desa memiliki urusan untuk menjalankan fungsi dari pemerintahannya. Adapun urusan pemerintahan desa yakni urusan tata pemerintahan, urusan pemberdayaan masyarakat desa, urusan kesejahteraan masyarakat dan urusan ketertiban lingkungan. sementara ini urusan pemerintahan desa tersebut, menjadi unit dalam organisasi pemerintahan Desa.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa struktur organisasi pemerintahan desa tidak harus merujuk kepada urusan yang dimlikinya. Namun Kepala Desa berhak mengusulkan struktur organisasi pemerintahan desa dan tata kerja (psl. 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur kewenangan

pemerintahan Desa. pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur tentang klasifikasi bidang dalam pemerintahan Desa. adapun bidang tersebut yakni penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. dengan pengaturan bidang dalam peraturan tersebut, maka struktur organisasi pemerintahan desa akan berganti yang sebelumnya unit teknis disebutnya Kepala urusan menjadi kepala bidang.

Selain itu, Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, menjadi dasar sebuah perubahan struktur organisasi pemerintah Desa. Dengan diberlakukannya peraturan tersebut, akan memperjelas kedudukan kewenangan dan pelaksana pelayanan teknis di Pemerintah Desa. Pemberlakuan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa memiliki dampak yang signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan adanya peraturan tersebut, terbentuk landasan hukum yang kuat untuk mengatur struktur organisasi dan kewenangan pemerintah desa. Peraturan ini menjadi dasar penting untuk melakukan perubahan struktur organisasi pemerintah desa. Penyesuaian ini melibatkan pembagian fungsi, tugas, dan tanggung jawab berbagai unit atau jabatan dalam struktur pemerintahan desa. Harapannya, perubahan tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, serta memastikan akuntabilitas yang lebih baik. Salah

satu aspek yang ditekankan oleh peraturan ini adalah penjelasan yang lebih tegas terkait kedudukan dan kewenangan di dalam pemerintah desa. Dengan demikian, setiap entitas dalam struktur organisasi dapat menjalankan fungsinya dengan lebih terkoordinasi dan terorganisir, menghindari tumpang tindih yang mungkin terjadi. Pemberlakuan peraturan ini juga memberikan landasan untuk pelaksanaan pelayanan teknis di pemerintah desa. Ini dapat mencakup pembentukan unit atau lembaga teknis yang secara khusus bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dalam berbagai bidang, seperti infrastruktur, kesehatan, atau pendidikan. Secara keseluruhan, konsep ini menegaskan pentingnya regulasi yang jelas dalam membentuk struktur organisasi dan kewenangan pemerintah desa. Dengan pemberlakuan Permendagri No. 84 Tahun 2015, diharapkan pemerintah desa dapat beroperasi secara lebih efektif dan transparan, serta mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat lokal.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan Eksplanasi, dimana data yang akan dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka (Sudarwan Danim, 2000). Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Moleong (2012), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Sementara itu, penelitian eksplanasi yang digunakan dalam penelitian ini karena dalam penelitian ini menggunakan dua variabel. Metode eksplanasi adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan dua variabel yang diteliti, yaitu variabel bebas dan variabel terikat yang kemudian menjelaskan hubungan atau pengaruh kedua variabel tersebut. Singarimbun (2003:46) mengatakan mengenai metode eksplanasi yaitu: “Apabila peneliti menjelaskan hubungan atau pengaruh kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis maka dinamakan penelitian penjelasan (Eksplanatory Research).”

2. Unit Analisis

Menurut Patten dkk (2018:71) berpendapat bahwa “*The unit of analysis is simply who or what constitutes one “unit” from which data has been collected in the study*” Unit analisis hanyalah siapa atau apa yang merupakan satu "unit" dari mana data telah dikumpulkan dalam penelitian ini. Berdasarkan definisi tersebut maka dapat dikatakan unit analisis adalah kesatuan dari unit pengumpulan data.

a. Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian Ini, lokasi yang diambil untuk melakukan penelitian adalah Kalurahan Widodomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

b. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah budaya organisasi terhadap Kinerja Pemerintah Kalurahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kalurahan Widodomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

c. Subjek/Informan

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaannya diteliti, (Sukandarumidi, 2002:65).

Informan penelitian dalam penelitian ini adalah Lurah (Kepada Desa), Pamong Kalurahan (Perangkat Desa) dan Masyarakat Kalurahan Widodomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun jumlah informan yang akan diwawancarai berjumlah 8 orang sebagai berikut:

Tabel I.I
Data Informan Kalurahan Widodomartani

No	Nama	Jabatan	JK	Pendidikan	Umur
1	Heruyono,S.T	Lurah (Kepala Desa)	L	S1	44 th
2	Taufiq Wahyu Widodo, SH	Carik (Sekretaris Desa)	L	S1	54th
3	Susilo Widodo,SSi	Kamitua (Bagian Sosial)	L	S1	45th
4	Sigid Ari Wibowo, SE	Kaur Danarta (Kelapa Urusan Keuangan)	L	S1	28th
5	Eviana Rahmawati	Kaur Tata Laksana (Kepala Urusan Bagian Umum)	P	SMA	31th
6	Haryawati	Masyarakat	P	SMA	50th
7	Marrati	Masyarakat	P	SMA	35th
8	Suarmi	Masyarakat	P	SMA	59th

Sumber : Data Primer 2024

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Lofland sebagaimana yang telah dikutip oleh Moleong (2000:112) bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ada-lah kata-kata dan tindakan, selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sedangkan metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan tiga cara yaitu, metode pengamatan, metode wawancara, dan metode dokumentasi.

a. Pengamatan/Observasi

Pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pencatatan terhadap setiap gejala (perilaku, kondisi, kegiatan, peristiwa) yang diamati. Dalam teknik ini memiliki ciri-ciri seperti membutuhkan waktu yang lama dan bersifat objektif yang dikarenakan adanya pengamatan langsung terhadap gejala tersebut (Nawari Ismail, 2015). Metode pengamatan ini memiliki tujuan untuk memperoleh gambaran secara umum Kalurahan Widodomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Observasi yang dilakukan peneliti yakni mengamati secara langsung kondisi yang nyata terjadi di Kalurahan Widodomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Bulan Mei 2023, serta mencari data baik berupa berita yang beredar, informasi, tulisan, gambar dan sebagainya yang berkaitan dengan Kinerja Pemerintah Kalurahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang selanjutnya akan dilakukan pencatatan oleh peneliti sebagai bentuk data yang diperoleh selama melakukan pengamatan di lapangan, sehingga yang nantinya peneliti akan membuat sebuah narasi ilmiah dalam bentuk laporan proposal penelitian.

b. Wawancara

Menurut Creswell yang dikutip dalam Sugiyanto, wawancara merupakan pengumpulan data yang dapat diajukan peneliti berupa pertanyaan kepada informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang valid (Sugiyanto, 2020). Informan terdiri dari Lurah (Kepala Desa), Carik (Sekretaris Desa), Pamong Kalurahan (Perangkat desa) dan tokoh masyarakat. Wawancara merupakan upaya memperoleh data pokok dan data pendukung.

Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti selama berada di lokasi penelitian yaitu wawancara mendalam, dalam proses wawancara ini peneliti akan melakukan tanya jawab dengan informan secara langsung agar setiap informasi yang diperoleh peneliti lebih rinci dan maksimal, dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan perekam audio untuk merekam setiap percakapan antara peneliti dan informan. Selanjutnya informasi yang telah didapat peneliti kemudian merangkum dan ditulis dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Menurut Creswell yang dikutip dalam Sugiyanto dokumen dalam kualitatif dapat berupa dokumen publik maupun pribadi (Sugiyanto, 2020). Proses dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data, misalnya dokumen, profil kalurahan, peraturan-peraturan dan lain sebagainya yang akan berhubungan

dengan judul penelitian. Dokumentasi yang diperoleh berupa foto narasumber.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumen berbentuk tulisan maupun gambar seperti: pertama, profil Kalurahan, APBKAL, Data Aset Kalurahan yang berisi tentang gambaran umum Kalurahan Widodomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa.Yogyakarta, kondisi geografis, keadaan demografi, kondisi sosial, kondisi ekonomi, visi misi kepala kalurahan, dan yang paling penting adalah struktur organisasi kalurahan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif. Menurut Sugiyono (2016:244) analisi interaktif adalah proses mencari dan penyusunan secara sistematis yang diperoleh dari hasil wa-wancara, dokumentasi dan catatan degan mengorganisasikan data ke dalam kategori dan menjabarkan ke dalam unit-unit serta menyusun dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti dan bisa menjadi informasi bagi orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam mengolah data yai-tu model miles dan Huberman. Menurut Mile dan Haberman (dalam Sugiyono, 2017: 246) analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai selesai, hingga data jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi: Reduksi data, Penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi.

Reduksi data merupakan langkah awal yang bertujuan agar data yang dikumpulkan mudah untuk dipahami. Tujuan utamanya yaitu pada temuan.

b. Penyajian Data

Miles dan Huberman (dalam Sugiono, 2017) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif yaitu dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

Tahap ini dilakukan peneliti melalui pengolahan data yang telah dihasilkan yang kemudian data tersebut dapat disajikan dengan lebih sistematis dan terorganisir agar hasil penelitian mudah untuk dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan, antara kategori, flowchart, dan sejenisnya, melakukan penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi,

dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan atas hal apa yang akan dipa-hami tersebut. Penyajian data dalam penelitian ini berfungsi untuk lebih memudahkan peneliti dalam memahami data yang diperoleh di lapangan.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ditemukan. Temuan yang ditemukan dapat berupa gambaran tentang objek yang sebelumnya belum jelas, sehingga setelah penelitian dilakukan menjadi jelas, berupa hubungan kausal atau iteraktif, hipotesis atau teori. Dengan adanya kesimpulan rumusan masalah yang telah dirumuskan diawal dapat terjawab. Tahap ini merupakan tahap akhir dalam analisis data. Agar kesimpulan tersebut menjadi baik maka harus melalui proses verifikasi selama penelitian berlangsung agar hasil penelitiannya jelas dan dapat dirumuskan kesimpulan akhirnya dengan tepat.

Kesimpulan atau *conclusion (drawing/verification)* dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan yang sudah dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

BAB II

PROFIL KELURAHAN WIDODOMARTANI

A. Sejarah Kalurahan Widodomartani

Sejarah mengenai Kalurahan Widodomartani berawal dari dua kata yaitu *Widodo* berarti Selamat/Bagus dan *Martani* berarti pertanian, jadi kalau digabungkan pengertiannya adalah Kalurahan yang baik untuk pertanian. Kalurahan Widodomartani terbentuk berdasarkan maklumat Sri Sultan HB IX pada tahun 1946 yang selanjutnya pada tahun 1951 mulai dibentuk Kalurahan Widodomartani yang merupakan gabungan dari tiga Kalurahan yaitu, Kalurahan Jeruksari, Kalurahan Dukuhsari, Kalurahan Kentisari.

Pada tahun 2020 Pemerintah Kalurahan Widodomartani bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan telah menetapkan Peraturan Kalurahan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penetapan Hari jadi Kalurahan Widodomartani yaitu pada tanggal 19 april. Oleh karena itu pada masa yang akan datang setiap tanggal tersebut, diperingati sebagai hari jadi Kalurahan Widodomartani.

Karena terbentuknya Kalurahan Widodomartani saat itu perangkat Kalurahan hanya terdiri dari :

1. Lurah
2. Carik
3. Modin
4. Kesejahteraan
5. Keamanan
6. Sosial

Selanjutnya Lurah yang pernah memimpin yakni:

1. Tahun 1951-1990 dipimpin oleh Bapak Purwo Widodo (39 Tahun)
2. Tahun 1990-1991 dipimpin oleh Bapak Suharjo (1 Tahun)
3. Tahun 1991-1998 dipimpin oleh Bapak Lamjai (7 Tahun)
4. Tahun 2001-2013 dipimpin oleh Bapak Tony Suryanto (12 Tahun)
5. Tahun 2014-sekarang dipimpin oleh Bapak Heruyono, S.T. (9 Tahun)

Sehingga dari awal terbentuknya Kalurahan Widodomartani, Kalurahan ini baru dipimpin oleh 5 orang Lurah. Berdasarkan sejarah Kalurahan Widodomartani di atas dapat disimpulkan bahwa masa kepemimpinan Lurah Widodomartani yang paling lama adalah Bapak Purwo Widodo selama 39 tahun. Bapak Purwo Widodo bisa menjabat selama 39 tahun karena pada saat tahun-tahun beliau menjabat belum ada ketentuan atau aturan dari Pemerintah Pusat terkait masa jabatan seorang Lurah Kalurahan. Namun dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kini masa jabatan seorang Kepala Desa sudah diatur dalam Undang-Undang tersebut. Sedangkan struktur Organisasi dan tata kerja pemerintahan kalurahan (SOTK) terbaru saat ini sesuai dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 46 Tahun 2016 tentang pedoman SOTK.

B. Keadaan Geografis

Kalurahan Widodomartani merupakan Kalurahan di Wilayah Kabupaten Sleman yang berlokasi di Ibukota Kapanewon Ngemplak, dengan luas wilayah Kalurahan Widodomartani kurang lebih 615 Ha. Jarak ke Ibukota

Kapanewon kurang lebih 100m, sedangkan jarak antara pusat Pemerintahan Kalurahan Widodomartani dengan Ibukota Kabupaten Sleman berjarak kurang lebih 15 km, jarak tempuh antara pusat Pemerintahan Kalurahan Widodomartani ke Ibukota Provinsi kurang lebih 20 km, dan jarak tempuh antara pusat Pemerintahan Kalurahan Widodomartani ke Ibukota Negara kurang lebih 650km. Wilayah Kalurahan Widodomartani berbatasan langsung dengan Kalurahan-Kalurahan di Kapanewon Ngemplak. Adapun batas-batas Kalurahan Widodomartani adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kalurahan Wikirsari
2. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kalurahan Selomartani
3. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kalurahan Umbulmartani
4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kalurahan Bimomartanis

Kalurahan Widodomartani memiliki dua jenis tanah yaitu tanah sawah atau tanah basah dan tanah kering yang dijadikan sebagai lahan kebun dan pemukiman warga. Dari kedua jenis lahan tersebut sebagian besar digunakan oleh masyarakat untuk berkebun dan bertani. Lahan perkebunan lebih banyak ditanami tanaman-tanaman seperti singkong, jagung, ubi jalar, sayur-sayuran, cabai, bawang, kunyit dan beberapa tanaman lainnya yang biasa digunakan sebagai bumbu dapur. Kemudian, lahan yang digunakan untuk pemukiman cukup luas, karena jumlah jiwa yang ada di Kalurahan Widodomartani cukup banyak yakni 10.176 jiwa.

Gambar II.1
Peta Kalurahan Widodomartani



(Sumber : Monografi Dinding Kalurahan Widodomartani, 2022)

Wilayah Kalurahan Widodomartani terdiri dari 19 Padukuhan, 31 Rukun Warga, dan 73 Rukun Tetangga. Berikut merupakan tabel daftar 19 padukuhan yang ada di Kalurahan Widodomartani beserta jumlah RT dan RW. Berikut gambar pembagian wilayah administratif Kalurahan Widodomartani, Sleman :

Tabel II.2
Pembagian Wilayah Administratif Kalurahan Widodomartani

No	Padukuhan	Jumlah RT	Jumlah RW	Nama Dukuh
1.	Blambangan	4	2	Suryanto
2.	Kalijeruk 1	3	1	Drs. YuniawanEko Putro
3.	Kalijeruk 2	3	1	Tri Handoko
4.	Ganjuram	2	1	Deni Dwi Harjanto
5.	Klancingan	2	1	Wahadi
6.	Jimat	2	1	Tri Hartono
7.	Jangkang	2	1	Saryadi

No	Padukuhan	Jumlah RT	Jumlah RW	Nama Dukuh
8.	Dalem	4	2	Kismadi
9.	Jetis	6	2	Haryono
10.	Banglen	3	1	Sumadiyono
11.	Kabunan	4	2	Kulup Jaka Umbaran
12.	Kemasan	4	2	Lingga Gupita
13.	Karang	4	2	Suharsono
14.	Ngalian	4	2	Sri Yulianti
15.	Kwadungan	4	2	Nanang Sujatmiko
16.	Karanganyar	2	1	Joko Wiratno, S.H., M.H.
17.	Pucangan	8	3	Amanda Pungky
18.	Pondok 1	5	2	Priangga arda P.
19.	Pondok 2	7	2	Suhamto
	Jumlah	73	31	

(Sumber : Website Kalurahan Widodomartani, 2022).

C. Keadaan Demografis

Sampai dengan tahun 2022 Kalurahan Widodomartani memiliki penduduk sebanyak 10.176 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 4.933 jiwa, penduduk perempuan sebanyak 4.928 jiwa yang terbagi dalam 3.665 Kepala Keluarga (KK). Penduduk Kalurahan Widodomartani tersebar di Wilayah Kalurahan Widodomartani yang terbagi dalam 19 Dusun, 73 Rukun Tetangga, 31 Rukun Warga.

Dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, penduduk Kalurahan Widodomartani didominasi oleh laki-laki.

1. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

Jumlah penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel II.3
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

No	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Orang/Jiwa)
1.	Di bawah 1 tahun	2	5	7
2.	2 s/d 4 Tahun	129	108	237
3.	5s/d 9 Tahun	322	291	614
4.	10 s/d 14 Tahun	372	324	697
5.	15 s/d 19 Tahun	357	317	676
6.	20 s/d 24 Tahun	359	351	713
7.	25 s/d 29 Tahun	329	295	630
8.	30 s/d 34 Tahun	288	304	597
9.	35 s/d 39 Tahun	326	349	675
10.	40 s/d 44 Tahun	366	371	741
11.	45 s/d 49 Tahun	391	367	759
12.	50 s/d 54 Tahun	349	364	716
13.	55 s/d 59 Tahun	300	304	604
14.	60 s/d 64 Tahun	254	259	516
15.	65 s/d 69 Tahun	178	231	411
16.	70 s/d 74 Tahun	171	176	348
17.	Diatas 75 Tahun	441	516	963
	Jumlah	4.933	4.928	10.176

(Sumber : Website Kalurahan Widodomartani, 2022)

Berdasarkan Tabel II.3 di atas Penduduk Kalurahan Widodomartani termasuk kedalam mayoritas usia penduduk muda (expansive) ditandai dengan sebagian besar penduduk berada diusia muda sehingga dapat dikatakan pertumbuhan penduduk di Kalurahan Widodomartani masih cukup tinggi.

2. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan, berikut agama yang dianut oleh warga Kalurahan Widodomartani dan jumlah penganutnya yaitu:

- a. Islam : 9.594 Orang
- b. Kristen : 76 Orang
- c. Katholik : 195 Orang
- d. Budha : 1 orang

Dapat dilihat data di atas menunjukkan bahwa penduduk di Kalurahan Widodomartani mayoritas beragama Islam dengan jumlah penduduk 9.594 jiwa.

3. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hak dasar manusia untuk hidup dengan layak. Tingkat pendidikan seseorang berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusianya. Proses pembangunan Kalurahan akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat

pendidikan yang cukup tinggi. Data masyarakat KalurahanWidodomartani berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 4
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang/jiwa)
1.	Belum atau tidak sekolah	2.388
2.	Belum tamat SD	898
3.	Tamat SD	788
4.	Tamat SLTP	1.336
5.	Tamat SLTA	3.225
6.	Diploma I/II	72
7.	Akademi/Diploma III/S.Muda	272
8.	Diploma IV/Strata I	713
9.	Strata II	52
10	Strata III	5
	Total	10.176

(Sumber: Website Kalurahan Widodomartani, 2022)

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa tingkat pendidikan di Kalurahan Widodomartani masih sangat rendah terbukti dengan jumlah warga yang tidak sekolah dan warga yang tidak tamat SD sangatlah banyak. Warga yang tidak bersekolah dan tidak tamat SD jumlahnya mencapai 3.286 orang, sedangkan warga yang tingkat pendidikannya SD berjumlah 788 orang. Jika kita menggabungkan warga yang tidak sekolah dengan yang belum tamat SD dan yang tamat SD jumlahnya adalah 4.074 orang berbanding jauh dengan warga yang tamat SLTP, SLTA dan perguruan tinggi yang jika digabungkan hanya sebanyak orang.

4. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

Mata pencaharian utama masyarakat di Kalurahan Widodomartani sebagian besar berada di sektor Pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat selain sektor pertanian, peternakan juga masih memiliki peranan penting bagi masyarakat Desa Widodomartani. Data Penduduk Kalurahan Widodomartani berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel II. 5
Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah (orang/jiwa)
1.	Belum atau tidak bekerja	1.570
2.	Pensiunan	312
3.	Mengurus Rumah Tangga	1.313
4.	Pelajar/mahasiswa	1.804
5.	Pegawai Negeri Sipil	239
6.	TNI/Polri	96
7.	Buruh/Tukang Berkeahlian Khusus	378
8.	Sektor Pertanian/Peternakan/Perikanan	2.067
9.	Karyawan BUMN/BUMD	32
10.	Karyawan Swasta	1.317
11.	Wiraswasta	772
12.	Tenaga medis	23
13.	Pekerjaan lain	38
	Jumlah	10.176

(Sumber: Website Kalurahan Widodomartani, 2022)

D. Keadaan Sarana dan Prasarana

1. Sarana dan Prasarana Keagamaan

Tabel II. 6
Sarana dan Prasarana Keagamaan

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	22
2.	Mushola	11
	Total	33

(sumber : Monografi Dinding Kalurahan Widodomartani, 2022)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah sarana dan prasarana keagamaan yang berada di Kalurahan Widodomartani sangat didominasi oleh Masjid dan Mushola yang diperuntukan untuk penduduk yang beragama Islam. Hal ini tentu saja sesuai dengan jumlah penduduk di Kalurahan Widodomartani yang mayoritasnya beragama Islam.

2. Sarana dan Prasarana Kependidikan

Tabel II. 7
Sarana dan Prasarana Kependidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Gedung SD/Sederajat	4
2.	Gedung SMP/Sederajat	1
3.	Gedung SMA/Sederajat	1
4.	Taman Bacaan	1
	Total	7

(sumber : Monografi Dinding Kalurahan Widodomartani, 2022)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah jenis fasilitas pendidikan Kalurahan Widodomartani mempunyai prasarana pendidikan yang cukup lengkap dengan fasilitas juga yang lengkap untuk pendidikan dari SD, SMP, SMA dan dilengkapi dengan Taman Bacaan.

3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Tabel II. 8
Sarana dan Prasarana Kesehatan

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1.	Posyandu	21
2.	Puskesmas	1
3.	Rumah Sakit	1
	Total	23

(sumber : Monografi Dinding Kalurahan Widodomartani, 2022)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah sarana prasarana kesehatan di Kalurahan Widodomartani cukup lengkap dengan adanya RS. Dengan adanya fasilitas kesehatan yang lengkap tentunya dapat menanggapi jika sewaktu-waktu masyarakat memerlukan penanganan yang bersifat urgen. Disatu sisi meskipun sarana kesehatan telah tersedia namun jika tidak adanya tenaga kesehatan maka sarana kesehatan pun tidak dapat beroperasi sesuai dengan fungsinya.

4. Sarana dan Prasarana Olahraga

Tabel II. 9
Sarana dan Prasarana Olahraga

No	Sarana Olahraga	Jumlah
1.	Lapangan Sepak Bola	1
	Total	1

Sumber : Monografi Dinding Kalurahan Widodomartani, 2022

Kebutuhan akan olahraga tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia begitupun dengan masyarakat Kalurahan Widodomartani. Namun dari sarana olahraga yang ada, sangat minim sekali untuk fasilitas olahraga.

E. Visi dan Misi

1. Visi Kalurahan Widodomartani

Terwujudnya Masyarakat Kalurahan Widodomartani Sejahtera, Damai, Damai, Mandiri, Religius yang Mandiri dari Sektor Pertanian, Perdagangan, UMKM dan Kebudayaan.

2. Misi Kalurahan Widodomartani

- a. Menjaga tata kelola Pemerintahan Kalurahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel
- b. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah kalurahan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan di masyarakat.
- d. Penguatan kelembagaan kalurahan sebagai mitra kerja dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, masyarakat dan pembangunan.
- e. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dengan memperkuat lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), taman kanak-kanak, perpustakaan kalurahan, perpustakaan masyarakat dan mendorong anak putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah.
- f. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan meningkatkan kapasitas institusi yang menangani bidang kesehatan antara lain poskesdes, posyandu, kelompok kader kesehatan, meningkatkan

kemitraan dengan Puskesmas dan pihak swasta yang bergerak di bidang kesehatan serta tetap melaksanakan budaya PHBS di Komunitas.

- g. Meningkatkan kualitas hidup umat beragama dengan meningkatkan kapasitas lembaga keagamaan yang ada, melakukan pembinaan bagi anggota masyarakat.
- h. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan budaya yang berkembang di masyarakat.
- i. Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berbasis pada sektor Pertanian, Perdagangan, UMKM dan mendorong berkembangnya Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal)
- j. Mendorong generasi muda untuk menghadapi era globalisasi dan modernisasi tanpa meninggalkan budaya dan kearifan lokal di masyarakat.
- k. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang proporsional, berkualitas dan berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

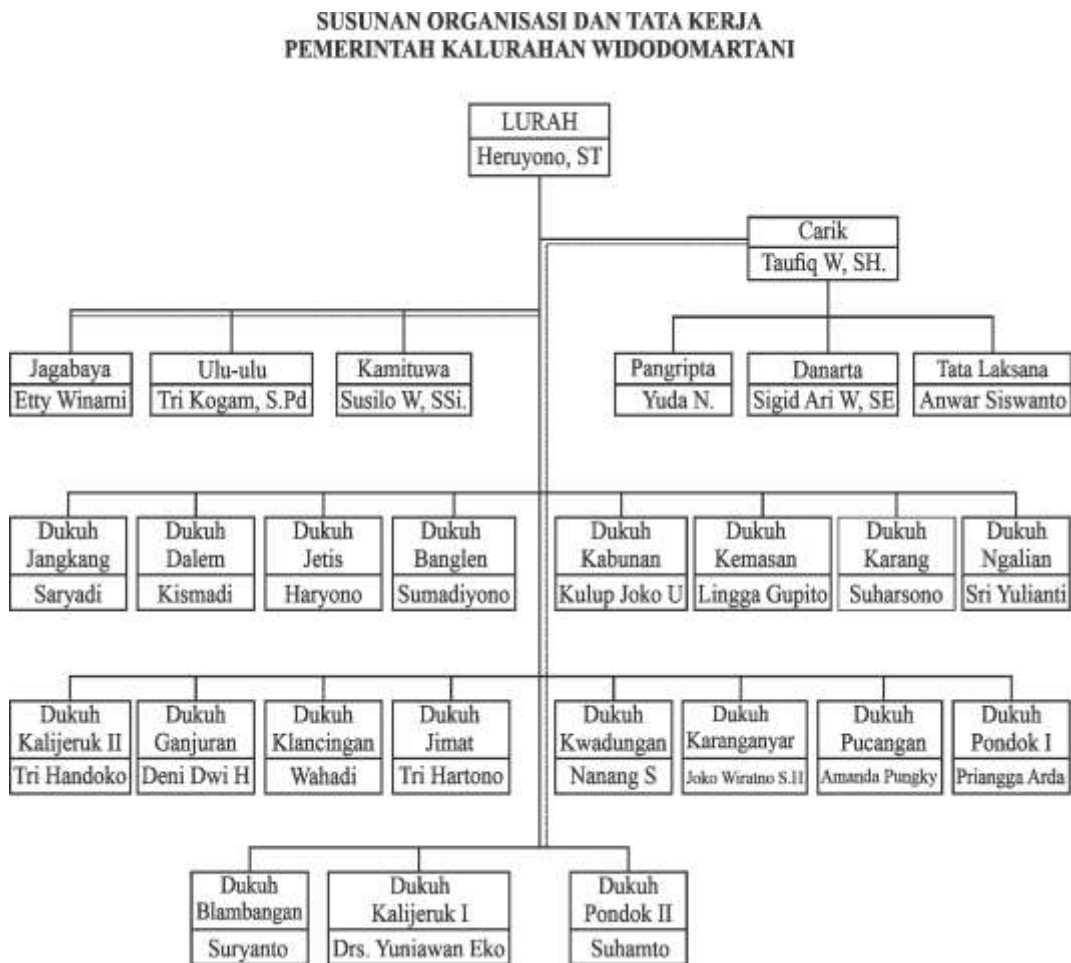
F. Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan Widodomartani

Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Sebagaimana dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa di dalam desa terdapat tiga kategori kelembagaan yang memiliki peranan dalam tata kelola kalurahan yaitu Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan , dan Lembaga Kemasyarakatan Dalam tersebut. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan

penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kalurahan atau desa (pemerintahan desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan pamong desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Pamong desa atau perangkat desa adalah pembantu kepala desa yang meliputi sekretaris desa, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan. Sekretariat desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administratif pemerintahan desa dan terbagi dalam 3 urusan yaitu urusan keuangan, urusan perencanaan dan urusan tata usaha dan umum. Pelaksana teknis terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan. Sedangkan untuk pelaksana kewilayahan dibagi menjadi 19 kewilayahan yang dipimpin oleh 19 kepala dusun. Hal ini dapat dilihat dari struktur susunan organisasi pemerintahan Kalurahan yang urutannya sesuai dengan kebutuhan pegawai dalam melayani masyarakat, mulai dari Lurah yang bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) untuk membangun pemerintahan Kalurahan yang konsisten dan juga pelayanan masyarakat yang tepat sasaran akan kebutuhan masyarakat Kalurahan Widodomartani.

Struktur organisasi Pemerintahan Kalurahan Widodomartani dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar II. 1 Struktur Organisasi Desa



Sumber : Monografi Kalurahan Widodomartani 2022

Berdasarkan struktur Pemerintah Kalurahan di atas dapat dilihat bahwa struktur tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Dalam upaya menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa, Kalurahan Widodomartani di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman memiliki struktur pemerintahan desa yang mencakup beberapa unsur utama.

Pada puncak struktur ini berada Lurah, yang merupakan kepala desa dengan tanggung jawab utama dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan di desa. Di bawah Lurah, terdapat Carik yang memiliki peran administratif dan keuangan dalam menjaga kelancaran administrasi desa. Selain itu, terdapat posisi lain seperti Pangripta, Danarta, dan Tata Laksana. Pangripta dan Danarta mungkin memiliki tanggung jawab terkait administrasi umum dan keuangan desa, sementara Tata Laksana bertugas mengurus tugas administratif dan pelaksanaan program desa.

Struktur Pemerintah Kalurahan Widodomartani juga mencakup posisi Jagabaya, Ulu-ulu, dan Kamituwa yang sejajar dengan Lurah dan Carik. Mereka mungkin memiliki tanggung jawab dalam berbagai aspek pemerintahan desa serta membantu pelaksanaan program dan tugas-tugas lainnya. Di tingkat yang lebih rendah, terdapat Para Dukuh yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan wilayah tertentu dalam desa.

Struktur ini mencerminkan komitmen desa dalam mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015. Meskipun rincian mungkin perlu disesuaikan dengan peraturan yang sebenarnya, struktur ini mencerminkan langkah nyata desa dalam menjalankan pemerintahan desa dengan efektif dan teratur.

G. Potensi dan Masalah

1. Potensi Kalurahan

a. Bidang Pendidikan

- 1) TK PKK Widodo
- 2) PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
- 3) PKMB

b. Bidang Kesehatan

- 1) Poskendes
- 2) Kader Kesehatan
- 3) Posyandu
- 4) Kampung Bebas Asap Rokok
- 5) Kampung Bebas Narkoba
- 6) BABS (Bebas Buang Air Besar di Sungai)

c. Bidang Ekonomi Masyarakat

- 1) Lahan Pertanian Yang Subur
- 2) SDM yang potensial diusia kerja
- 3) Lahan Perikanan yang luas

- 4) Industri Rumah Tangga
- 5) Wisata Alam dan Wisuda Budaya
- 6) Pasar Hewan
- 7) Pasar hasil bumi
- 8) LKM
- 9) Sarana Transportasi
- 10) Sarana Irigasi
- 11) Koperasi
- d. Bidang Keamanan dan Ketertiban
 - 1) Lembaga Keamanan Swadaya
 - 2) Sarana Poskamling Padukuhan
 - 3) Babinkantibmas
 - 4) Komunitas Sosial
- e. Partisipasi Masyarakat
 - 1) Budaya Gotongroyo Masyarakat masih tinggi
 - 2) Swadaya Masyarakat
- f. Pemerintah Desa
 - 1) Sarana dan Prasarana Kantor memadai
 - 2) SDM Perangkat Desa yang memadai
 - 3) Anggota BPD yang solid
- g. Lembaga Kemasyarakatan
 - 1) Lembaga Kemasyarakatan Desa telah terbentuk
 - 2) SDM Lembaga Kemasyarakatan yang memadai

2. Masalah

a. Bidang Pendidikan

- 1) Minimnya biaya operasional
- 2) Terbatasnya tenaga pendidik
- 3) Terbatasnya Sarpras

b. Bidang Kesehatan

- 1) Keterbatasan Tenaga Poskesdes
- 2) Keterbatasan Biaya Operasional
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk PHBS

c. Bidang Ekonomi Masyarakat

- 1) Banyaknya masyarakat usia kerja yang belum bekerja
- 2) Saluran irigasi yang belum memadai
- 3) Kekurangan modal usaha
- 4) Sarpras pasar desa yang belum memadai
- 5) Belum terbentuknya BUMDes
- 6) Wisata alam yang belum dikelola dengan baik
- 7) Sarana transportasi belum memadai

d. Bidang Keamanan dan Ketertiban

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan rumahnya
- 2) Keterbatasan sarpras POSKAMLING

e. Partisipasi Masyarakat

Kurangnya informasi untuk meraih dana pendamping untuk mendukung pembangunan masyarakat.

f. Pemerintahan Desa

- 1) Fasilitas kantor yang belum memadai
- 2) PAD belum maksimal
- 3) Kurangnya BIMTEK terkait dengan tupoksi
- 4) Kurangnya pendapatan kalurahan yang mengakibatkan kurang maksimal dalam melaksanakan pembangunan kalurahan

g. Lembaga Kemasyarakatan

- 1) Sarpras belum memadai
- 2) Kegiatan Lembaga belum maksimal

Dalam bidang pendidikan, Widodomartani memiliki potensi yang beragam. Ada beberapa lembaga pendidikan, termasuk TK PKK Widodo, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), dan PKMB. Ini mencerminkan komitmen untuk memberikan pendidikan yang baik kepada generasi muda.

Di bidang kesehatan, potensi terlihat dari adanya Poskendes, kader kesehatan, dan Posyandu. Langkah-langkah seperti mendirikan Kampung Bebas Asap Rokok dan Kampung Bebas Narkoba menunjukkan perhatian terhadap kesehatan masyarakat.

Sektor ekonomi masyarakat juga memiliki potensi yang menonjol. Lahan pertanian yang subur, sumber daya manusia potensial dalam usia

kerja, lahan perikanan yang luas, dan keberadaan industri rumah tangga menjadi pijakan untuk kemajuan ekonomi.

Keamanan dan ketertiban didukung oleh lembaga keamanan swadaya dan sarana Poskamling Padukuhan. Masyarakat juga turut berperan dalam menjaga lingkungan dan keamanan melalui komunitas sosial. Partisipasi masyarakat merupakan aset berharga dengan budaya gotong royong yang masih kuat. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan swadaya juga mencerminkan semangat kolaboratif dalam pembangunan. Dalam pemerintahan desa, adanya sarana dan prasarana kantor yang memadai, SDM perangkat desa yang cukup, serta anggota BPD yang solid menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan efektif. Lembaga kemasyarakatan desa, dengan sarana yang memadai dan SDM yang cukup, menjadi panggung bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial.

Namun demikian, Kalurahan Widodomartani juga menghadapi sejumlah masalah. Dalam bidang pendidikan, terdapat kendala seperti minimnya biaya operasional, kurangnya tenaga pendidik, dan terbatasnya sarana prasarana. Di bidang kesehatan, keterbatasan tenaga Poskesdes, biaya operasional yang terbatas, serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengadopsi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) menjadi tantangan. Sektor ekonomi masyarakat menghadapi kendala seperti banyaknya usia kerja yang belum bekerja, kurangnya saluran irigasi yang memadai, kekurangan modal usaha, dan sarana pasar desa yang belum

memadai. Keamanan dan ketertiban masyarakat juga terpengaruh oleh kurangnya kesadaran dalam menjaga lingkungan serta terbatasnya sarana Poskamling.

Partisipasi masyarakat terhambat oleh kurangnya informasi terkait dana pendampingan untuk mendukung pembangunan masyarakat. Dalam pemerintahan desa, fasilitas kantor yang kurang memadai, pendapatan asli desa (PAD) yang belum optimal, serta kurangnya pelatihan (BIMTEK) terkait tugas perangkat desa menjadi tantangan. Lembaga kemasyarakatan desa juga menghadapi kendala berupa kurangnya sarana dan SDM yang memadai. Melalui pemahaman mendalam terhadap potensi dan masalah yang ada, Kalurahan Widodomartani dapat mengambil tindakan yang tepat untuk memanfaatkan potensi sebaik-baiknya dan mengatasi masalah yang dihadapi. Dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, Kalurahan Widodomartani dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kesejahteraan kepada seluruh warganya.

H. Strategi Pembangunan Kalurahan

1. Strategi Pembangunan Kalurahan

Untuk mewujudkan Pemerintah Kalurahan yang baik, dan sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kalurahan Widodomartani tahun 2021 – 2026, perlu dilaksanakannya implementasi dari Visi dan Misi tersebut, dengan tujuan untuk menyelenggarakan pemerintah yang efektif dan efisien. Salah satu strategi yang digunakan dalam melaksanakan program sebagaimana yang telah tertuang dalam Visi dan Misi dan dijabarkan ke

dalam RPJMKal, Pemerintah Kalurahan Widodomartani menentukan strategi pembangunan dengan cara pembangunan partisipatif, dimana dengan strategi tersebut dapat melibatkan unsur masyarakat dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dengan pembangunan secara partisipatif, pembangunan yang dilaksanakan akan selaras dengan apa harapan dan kebutuhan dari masyarakat, dalam hal ini masyarakat juga dapat lebih berperan aktif dalam pembangunan seperti yang dicita-citakan dalam Visi dan Misi.

Dari kegiatan prioritas yang direncanakan setiap tahun menjadi fokus pelaksanaan pembangunan di Kalurahan Widodomartani sesuai dengan tahun anggaran yang ada melalui bidang pendidikan, kesehatan dan lingkungan, sarana prasarana, politik, social, budaya, agama, ekonomi dan kamtibmas dengan memanfaatkan beberapa sumber pendanaan baik Pemerintah Pusat, daerah maupun Kalurahan, Dana Desa, ADD, PAD, swadaya masyarakat serta bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat.

Target pencapaian pembangunan ini diupayakan secara bertahap dengan mendahulikan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat pada berbagai bidang kegiatan yang ada, namun pelaksanaan kegiatan juga akan disesuaikan dengan perolehan anggaran yang mampu diakses oleh kalurahan . Untuk kegiatan dalam skala pembiayaan yang besar seperti sarana dan prasarana dasar dan lain-lain, maka pembiayaanya diupayakan dari Pemerintah Pusat seperti Dana Desa dan ADD maupun bantuan dari

Pemerintah daerah. Sedangkan kegiatan dalam skala kecil pembiayaannya berasal dari PAD dan swadaya masyarakat.

Pelaksana dan koordinator masing-masing kegiatan sedapat mungkin disesuaikan dengan tupoksi masing-masing kelembagaan yang ada, namun tetap melibatkan masyarakat dan khususnya penerima manfaat atau sasaran. Untuk kegiatan yang terkait dengan sarana prasarana umum, kesehatan, Pendidikan, ekonomi, agama, budaya dan kantibmas akan dikelola oleh Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, Pemerintah kalurahan dan masyarakat.

Seluruh kegiatan pembangunan beserta pencapaian target akan senantiasa dievaluasi secara rutin serta melibatkan masyarakat (partisipatif). Pemantauan, evaluasi dan pertanggungjawaban dimaksud dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut:

- a. Mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan baik fisik, biaya maupun administrasi.
- b. Mengevaluasi pencapaian kegiatan secara fisik (Volume dan Kualitas)
- c. Mengevaluasi sasaran dan dampak
- d. Mengevaluasi pelestarian lingkungan dan kelanjutan kegiatan.

Bentuk pemantauan dan evaluasi yang dapat diterapkan nantinya adalah sebagai:

- a. Pemantauan Bersama oleh masyarakat dan BPKal.
- b. Musyawarah pertanggungjawaban oleh masing-masing lembaga yang bertanggungjawab, dimana pelaksanaannya mengacu pada aturan masing-masing program atau kegiatan.
- c. Musyawarah evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap pencapaian kegiatan seluruh program yang dilaksanakan pemerintah kalurahan, dilakukan rutin setiap tahun bersamaan dengan Muskal, musrenbangkal maupun setiap pertemuan rutin seluruh pamong kalurahan.

2. Kebijakan Pembangunan Kalurahan

Dalam menentukan kebijakan yang selaras dengan apa yang telah tertuang dalam Visi dan Misi, Pemerintah Kalurahan Widodomartani yang menentukan agenda, tujuan dan sasaran program pembangunan 6 tahun ke depan.

Sebagai upaya pencapaian pembangunan yang diharapkan maka dirumuskan Arah kebijakan, Adapun arah kebijakan Pembangunan Kalurahan Widodomartani sebagai berikut:

- a. Peningkatan kinerja aparatur desa melalui bimbingan teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing aparatur desa.
- b. Peningkatan pemberdayaan masyarakat di segala bidang.
- c. Penataan regulasi di berbagai bidang dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan desa.

- d. Peningkatan SDM di semua elemen masyarakat yang berilmu, sehat, agamis, berbudaya melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di tingkat RT/RW/Padukuhan dan seterusnya.
- e. Peningkatan peran serta perempuan (penyetaraan gender) dalam kegiatan pembangunan.
- f. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya toleransi antar umat beragama.
- g. Peningkatan kesadaran mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan membentuk, mengembangkan dan memasyarakatkan perpustakaan desa.
- h. Peningkatan Kamtibmas.
- i. Peningkatan sumber-sumber pendapatan desa dengan membentuk BUMDES
- j. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi, pemukiman, irigasi, air bersih, seni dan olahraga, kesehatan dan pasar sebagai sarana pemasaran hasil bumi dan industry rumah tangga.
- k. Peningkatan pengelolaan desa wisata.
- l. Peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat melalui sosialisasi-sosialisasi.

Pemerintah Kalurahan Widodomartani, yang berlokasi di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, telah merumuskan arah kebijakan pembangunan untuk periode enam tahun mendatang. Tujuan dari arah kebijakan ini adalah untuk mewujudkan visi dan misi yang telah

ditetapkan sekaligus memberikan panduan yang jelas dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan terarah.

Salah satu poin penting dalam arah kebijakan ini adalah peningkatan kinerja aparatur desa melalui bimbingan teknis yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Peningkatan ini diarahkan untuk memastikan pelayanan publik yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemerintah kalurahan juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat di berbagai aspek kehidupan. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan, diharapkan tercipta keterlibatan aktif dan tanggung jawab bersama dalam pembangunan. Dalam upaya menciptakan lingkungan hukum yang lebih jelas, penataan regulasi di berbagai bidang menjadi salah satu fokus utama. Dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan desa, diharapkan terbentuk landasan hukum yang kuat untuk pelaksanaan program pembangunan. Selanjutnya, pemerintah kalurahan juga menyoroti pentingnya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di seluruh lapisan masyarakat. Upaya ini mencakup aspek pendidikan, kesehatan, agama, dan budaya, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang berkualitas, berdaya saing, dan berbudaya tinggi.

Dalam rangka mencapai kesetaraan gender, pemerintah kalurahan mengambil langkah penyetaraan peran perempuan dalam pembangunan. Ini adalah upaya untuk menciptakan peluang yang setara bagi semua warga

serta memperkuat peran perempuan dalam proses pembangunan. Toleransi antar umat beragama juga menjadi perhatian penting dalam arah kebijakan ini. Kesadaran akan pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap keragaman agama diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan inklusif.

Selanjutnya, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ditekankan melalui pembentukan, pengembangan, dan pemasyarakatan perpustakaan desa. Langkah ini diambil untuk meningkatkan akses dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi di kalangan masyarakat. Dalam hal kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat), pemerintah kalurahan bertujuan untuk meningkatkannya. Ini dilakukan dengan tujuan menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, sehingga masyarakat dapat hidup dengan tenang dan produktif.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi strategi untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan desa dan mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam bidang sarana dan prasarana, pemerintah kalurahan menargetkan peningkatan kualitas transportasi, pemukiman, irigasi, air bersih, seni dan olahraga, kesehatan, serta pasar. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan ekonomi dan kesejahteraan. Pengelolaan desa wisata menjadi fokus untuk memanfaatkan potensi sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan dan pengenalan wilayah kepada wisatawan.

Upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi adalah langkah penting untuk menciptakan pemahaman hukum yang lebih baik dan lingkungan hukum yang berkeadilan. Dengan merumuskan arah kebijakan ini, Pemerintah Kalurahan Widodomartani berupaya menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

3. Prioritas Pembangunan Kalurahan

Setelah tertuang dalam strategi pembangunan dan kebijakan pembangunan, dalam menentukan prioritas pembangunan juga perlu diperhatikan agar Visi dan Misi yang telah ditetapkan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Seperti yang dijelaskan dalam strategi pembangunan yang telah ditetapkan bahwa kegiatan pembangunan bersifat partisipatif, dan sesuai dengan kebijakan pembangunan bahwa kegiatan pembangunan berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat, Pemerintah Kalurahan Widodomartani mempunyai prioritas pembangunan kalurahan yang diperoleh dengan cara melaksanakan musyawarah dari tingkat padukuhan pada saat merencanakan kegiatan pembangunan. Dengan adanya kegiatan tersebut, masyarakat dapat lebih berperan aktif dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Secara garis besar, prioritas pembangunan Pemerintah Kalurahan Widodomartani menitikberatkan pada kegiatan Pembangunan Fisik dan Pembangunan Non Fisik dengan sistem swakelola masyarakat, jadi dalam hal

pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kalurahan Widodomartani selalu memberdayakan masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok.

Prioritas pembangunan Kalurahan Widodomartani berdasarkan kajian dari potensi dan masalah adalah sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan

Peningkatan mutu pendidikan baik tingkat PAUD, TK maupun Sekolah dasar yang dikelola oleh kalurahan Widodomartani.

b. Bidang Kesehatan

Peningkatan mutu kesehatan masyarakat agar pembangunan kalurahan berjalan maksimal

c. Bidang Ekonomi Masyarakat

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai sektor diataranya pertanian, perdagangan, industri kecil dan budaya, serta meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat.

d. Bidang Keamanan dan ketertiban

Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pendekatan social guna menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kantibmas dilingkungan masing-masing dan penguatan kelembagaan kantibmas.

e. Bidang Partisipasi masyarakat

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan di wilayah desa dengan membangun kesadaran masyarakat dalam bergotongroyong.

f. Bidang Pemerintahan Kalurahan

Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dengan membangun sarpras perkantoran yang memadai dengan mengelola jaringan teknologi informasi yang ada dan meningkatkan kapasitas aparat pemerintah kalurahan widodomartani beserta lembaganya.

g. Bidang Lembaga Kemasyarakatan

Untuk memperkuat kapasitas lembaga Kemasyarakatan maka perlu dibangun sarana perkantoran Lemabaga Kemasyarakatan kalurahan, Penguatan Kelembagaan dengan merekrut pengurus lembaga yang memadai serta mengoptimalkan kegiatan lembaga kalurahan.

Pemerintah Kalurahan Widodomartani, yang terletak di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, telah merumuskan strategi pembangunan yang berfokus pada visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan visi dan misi tersebut, penting untuk menetapkan prioritas pembangunan yang sesuai. Pendekatan partisipatif menjadi dasar dalam menentukan prioritas ini, dengan melibatkan masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan.

Secara umum, prioritas pembangunan Pemerintah Kalurahan Widodomartani memiliki dua fokus utama: pembangunan fisik dan pembangunan non-fisik. Keduanya dikelola dengan sistem swakelola oleh masyarakat, sehingga memberikan peran yang aktif kepada warga dalam proses pembangunan. Terdapat beberapa bidang yang menjadi prioritas dalam rencana pembangunan:

Pertama, dalam bidang pendidikan, fokus utama adalah peningkatan mutu pendidikan di tingkat PAUD, TK, dan Sekolah Dasar yang dikelola oleh kalurahan. Upaya ini diarahkan untuk memberikan akses pendidikan berkualitas kepada seluruh anak di kalurahan. *Kedua*, dalam bidang kesehatan, tujuan utama adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat agar pembangunan kalurahan dapat berjalan dengan maksimal. Ini mencakup program-program kesehatan dan edukasi kesehatan guna memastikan kesejahteraan masyarakat. *Ketiga*, dalam bidang ekonomi masyarakat, Pemerintah Kalurahan Widodomartani berfokus pada peningkatan kesejahteraan melalui sektor-sektor seperti pertanian, perdagangan, industri kecil, dan budaya. Pembangunan sarana dan prasarana perekonomian juga diutamakan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. *Keempat*, untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, pemerintah kalurahan menerapkan pendekatan sosial dengan mendorong kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan. Penguatan kelembagaan keamanan juga menjadi bagian dari

prioritas ini. *Kelima*, partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi hal penting. Peningkatan peran serta masyarakat dalam wilayah desa melalui pengembangan kesadaran akan pentingnya gotong royong menjadi salah satu tujuan utama dalam bidang ini. Keenam, dalam bidang pemerintahan kalurahan, upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dengan membangun sarana perkantoran yang memadai dan memanfaatkan teknologi informasi. Peningkatan kapasitas aparat pemerintah kalurahan dan lembaga-lembaga terkait juga diupayakan.

Terakhir, penguatan lembaga kemasyarakatan menjadi prioritas, termasuk pembangunan sarana perkantoran yang memadai dan peningkatan kelembagaan melalui rekrutmen pengurus yang berkualitas serta pengoptimalan kegiatan lembaga kemasyarakatan. Dengan menetapkan prioritas pembangunan yang sesuai dengan potensi dan masalah yang ada, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat, Pemerintah Kalurahan Widodomartani berharap dapat menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat positif bagi seluruh warganya.

4. APBDES Kalurahan Widodomartani

Gambar II. 2 APBDes Kalurahan Widodomartani



Sumber: Pendapatan Kalurahan Widodomartani 2023.

Tabel II.10
Pendapatan Kalurahan Widodomartani

Nomor	Pendapatan Kalurahan	
1.	Pendapatan asli kalurahan	120.000.000
2.	Dana desa kalurahan	989.614.000
3.	Alokasi dana desa kalurahan	1.568.734.622
4.	bagi hasil pajak dan retribusi daerah	550.000.000
6.	Bantuan keuangan khusus dari provinsi	770.292.000.
7.	Total pendapatan	4.198.640.622

Sumber: APBKal Kalurahan Widodomartani

Tabel tersebut menggambarkan rincian pendapatan Kalurahan Widodomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman. Rincian pendapatan tersebut adalah: Pendapatan asli kalurahan senilai Rp 120.000.000. Pendapatan ini berasal dari berbagai sumber seperti retribusi dan pajak yang dihasilkan di kalurahan.

Dana desa kalurahan sebesar Rp 989.614.000. Dana desa merupakan bantuan keuangan dari pemerintah pusat melalui pemerintah daerah untuk mendukung program dan pelayanan di kalurahan. Alokasi dana desa kalurahan senilai Rp 1.568.734.622. Alokasi ini diberikan oleh pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan dan pelayanan di kalurahan.

Bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebesar Rp 550.000.000. Pendapatan ini berasal dari pajak dan retribusi yang dikumpulkan di tingkat daerah dan dibagikan kembali ke kalurahan. Bantuan keuangan khusus dari provinsi senilai Rp 770.292.000. Bantuan ini bertujuan untuk mendukung berbagai kegiatan dan program di kalurahan. Total pendapatan keseluruhan adalah Rp 4.198.640.622. Jumlah ini mencerminkan besarnya

dukungan keuangan yang tersedia untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kalurahan Widodomartani. Informasi dalam tabel ini memberikan gambaran komprehensif tentang sumber-sumber pendapatan yang dimiliki oleh Kalurahan Widodomartani. Pendapatan ini memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayah tersebut, serta memastikan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup warga.

Tabel II. 11
Belanja Kalurahan

Belanja Kalurahan	Jumlah	Persentase
Bidang 1 penyelenggaraan pemerintahan kalurahan	2.207.692.800	50%
Bidang 2 bidang pelaksanaan pembangunan kalurahan	1.398.541.000	32%
Bidang 3 bidang pembinaan kemasyarakatan	455.517.000	11%
Bidang 4 bidang pemberdayaan masyarakat kalurahan	220.672.000	2%
Bidang 5 bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa	455.517.000	5%
Total	4.407.622.800	--

Sumber: APBKal Kalurahan Widodomartani.

Tabel tersebut menggambarkan bagaimana alokasi belanja Kalurahan Widodomartani terbagi dalam berbagai bidang. Melalui analisis informasi yang tertera:

Alokasi belanja Kalurahan Widodomartani mencerminkan perhatian yang diberikan pada berbagai aspek utama: Bidang Penyelenggaran Pemerintahan: Alokasi dana sebesar 50% menunjukkan fokus pada menjalankan tugas-tugas administratif dan operasional pemerintahan. Ini penting untuk memastikan pemerintahan yang efisien dan transparan di tingkat kalurahan. Bidang Pelaksanaan Pembangunan: Alokasi sebesar 32% menunjukkan upaya yang diberikan pada pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum. Hal ini mencerminkan keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup warga melalui pengembangan wilayah secara keseluruhan.

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan: Alokasi dana sebesar 11% menandakan pentingnya pembinaan dalam aspek sosial dan budaya. Fokus pada bidang ini menunjukkan upaya untuk memperkuat jalinan sosial dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Meskipun persentase kecil (2%), alokasi ini menunjukkan perhatian terhadap pemberdayaan masyarakat melalui program-program yang meningkatkan kemandirian dan kapasitas warga. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat: Alokasi 5% untuk bidang ini menunjukkan kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi darurat. Ini mencerminkan perhatian terhadap keselamatan warga dalam menghadapi berbagai ancaman.

Keseluruhan alokasi belanja ini mencerminkan komitmen Kalurahan Widodomartani untuk memastikan efisiensi pemerintahan,

pembangunan yang berkelanjutan, penguatan hubungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai tantangan. Alokasi dana yang tepat dalam berbagai bidang ini dapat membantu mewujudkan perkembangan dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat Kalurahan Widodomartani.

Tabel II. 12
Penggunaan Dana Desa

Nomor	Penggunaan Dana Desa	Jumlah
1.	Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	11.110.000
2.	Penyelenggaraan musyawarah, perencanaan desa/pembahasan APBDes (reguler)	17.090.000
3.	Koordinasi/kerja sama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa	28.490.000
4.	Pembangunan peningkatan sarana prasarana TK	18.000.000
5.	Pengelolaan perpustakaan milik desa	16.580.000
6.	Penyelenggaraan pos kesehatan milik desa	13.700.000
7.	Penyelenggaraan posyandu	67.724.000
8.	Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan	20.674.000
9.	Penyelenggaraan desa siaga kesehatan	9.734.000
10.	Fasilitasi kegiatan bidang kesehatan	11.580.000
11.	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan	151.860.000
12.	Pembangunan jalan desa	48.240.000
13.	Pelaksanaan program kali bersih	9.550.000
14.	Fasilitasi/pendampingan bulan bakti gotong royong	9.680.000
15.	Fasilitasi/pendamping dan penyuluhan pengurus tempat ibadah	46.710.000
16.	Pelaksanaan gelar potensi desa	9.120.000
17.	Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga	16.820.000
18.	Pembinaan karang taruna	16.220.000
19.	Pembinaan TKK	23.978.000
20.	Pembentukan dan pembinaan kader pemberdayaan masyarakat desa	9.514.000

Nomor	Penggunaan Dana Desa	Jumlah
21.	Pemberdayaan/pembinaan dan pemberian stimulan bagi lembaga non pemerintah (PAUD)	26. 464. 000
22.	Pemberdayaan/pembinaan dan pemberian stimulan kegiatan warga masyarakat desa	41. 520. 000
23.	Pemberdayaan/pembinaan dan pemberian stimulan bagi kelompok masyarakat	29. 384. 000
24.	Pelatihan budi daya perikanan	9. 130. 000
25.	Pembangunan/rehabilitas saluran irigasi tersier	63. 240. 000
26.	Pembinaan dan pelatihan kelompok tani	18. 650. 000
27.	Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	10. 638. 000
28.	Pelatihan dan penguatan penyandang difabel	10. 224. 000
29.	Pendapatan/pemberdayaan keluarga miskin, rentan dan difabel	20. 420. 000
30.	Fasilitasi/pendampingan desa ramah anak	10. 434. 000
31.	Fasilitasi program penanggulangan kemiskinan tingkat desa	40. 234. 000
32.	Pelatihan manajemen koperasi	18. 740. 000
33.	Pelatihan pengelolaan BUMKAL	6. 642. 000
34.	Pengelolaan pasar desa	12. 320. 000
35.	BLT Dana Desa	115. 200. 000
36.	Total Penggunaan dana desa	989. 614. 000

Sumber: APBKAL Kalurahan Widodomartani

Tabel tersebut menguraikan penggunaan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKAL) Widodomartani. Dari rincian tersebut, dapat diambil beberapa gambaran penting: Penggunaan Dana Desa difokuskan pada berbagai bidang yang mencakup: Administrasi dan Pemerintahan: Dana digunakan untuk menjaga administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan. Ini penting untuk menjaga ketertiban data dan kelancaran operasional administratif.

Musyawarah dan Perencanaan Desa: Dana dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan musyawarah, perencanaan desa, dan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Ini menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan desa. Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan: Alokasi dana digunakan untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa. Ini mencerminkan perhatian pada sinergi antara berbagai aspek kegiatan. Peningkatan Sarana Pendidikan: Dana dialokasikan untuk memperbaiki sarana Taman Kanak-Kanak (TK), menunjukkan perhatian terhadap pendidikan usia dini.

Pengelolaan Perpustakaan dan Kesehatan: Alokasi dana diberikan untuk pengelolaan perpustakaan desa dan pos kesehatan desa. Hal ini mencerminkan upaya dalam mengembangkan literasi dan perhatian terhadap kesehatan masyarakat. Posyandu dan Penyuluhan Kesehatan: Dana digunakan untuk mengadakan posyandu dan penyuluhan kesehatan. Ini mencerminkan perhatian terhadap aspek kesehatan masyarakat, terutama ibu dan anak. pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana digunakan untuk berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, termasuk kelompok tani dan kelompok difabel. Ini menunjukkan dukungan pada pengembangan kapasitas masyarakat. Pembangunan Infrastruktur: Dana dialokasikan untuk pembangunan jalan lingkungan dan jalan desa, mencerminkan usaha dalam meningkatkan konektivitas dan fasilitas fisik.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa: Dana dialokasikan untuk program BLT Dana Desa, yang bertujuan membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Secara keseluruhan, penggunaan Dana Desa dalam APBKal Widodomartani menunjukkan kesadaran akan kebutuhan masyarakat dan upaya untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dalam mendukung berbagai aspek pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan kesejahteraan masyarakat.

5. Data Aset Desa

Tabel II. 13
Aset Tanah Desa

No.	Jenis Barang	Kode barang	Identitas barang	Pengguna barang	Tahun perolehan	Nilai perolehan
1.	Tanah kuburan luas 2. 4865 m2	01. 01. 03. 01	Leter C	Masyarakat	1946	Kas Lama
2.	Tanah sawah luas 86. 2610 m2	01. 02. 01. 01	Leter C dan SHN	Pamong dan masyarakat	1946	Kas Lama
3.	Tanah tegalan luas 1. 4050 m2	01.02. 02.04	Leter C	-	1946	Kas Lama
4.	Tanah perkebunan luas 6250 m2	01.03.01 .02	Letter c	-	1946	Kas lama
5.	Tanah longsor 3085 m2	01.08.01 .02	Letter c	-	1946	Kas lama
6.	Tanah lahar	01.08.01 .03	Letter c	-	1946	Kas lama
7.	Tanah pasar luas 2150 m2	01.11.02 .01	Letter c	kalurahan	1946	Kas lama
8.	Tanah pertokoan luas 1850 m2	01.11.02 .02	Letter c	penyewa	1946	Kas lama
9.	Tanah bangunan luas 1800 m2	01.11.04 .01	Letter c	-	1946	Kas lama

No.	Jenis Barang	Kode barang	Identitas barang	Pengguna barang	Tahun perolehan	Nilai perolehan
10.	Tanah bangunan luas 4900 m ²	01.11.04 .01	Letter c	-	1981	Desa
11.	Tanah bangunan luas 300 m ²	01.11.04 .01	Letter c	-	1980	Desa
12.	Tanah pendidikan luas 2.4500 m ²	01.11.04 .02	Letter c	SMP N NGEMPLA K 1	1981	Desa
13.	Tanah kesehatan luas 1.600 m ²	01.11.04 .03	Letter c	Puskesmas	1980	Desa
14.	Tanah ibadah luas 2690 m ²	01.11.04 .05	Letter c	-	1984	Desa
15.	Tanah olah raga 1.5215 m ²	01.11.04 .08	Letter c	-	1946	Desa
16.	Tanah pendidikan luas 500 m ²	01.11.04 .02	Letter c	UPT	1991	Desa

Sumber: Aset Desa 2023 kalurahan Widodomartani

Tabel tersebut menghadirkan sekumpulan data yang menguraikan berbagai aspek terkait tanah kas desa di Kalurahan Widodomartani. Analisis lebih mendalam dari informasi yang terkandung dalam tabel ini membawa cahaya terhadap dinamika dan kompleksitas pengelolaan aset tanah di wilayah desa tersebut. Jenis dan Kode Barang: Tabel mengidentifikasi sejumlah jenis tanah kas desa yang memiliki kode klasifikasi spesifik. Kode ini memiliki makna tersembunyi, merinci karakteristik masing-masing tanah untuk mempermudah identifikasi dan pengelompokan. Identitas Barang: Setiap jenis tanah memiliki identitas unik yang terdiri dari kode dan deskripsi. Identitas ini adalah kunci untuk memahami peruntukan dan perbedaan di antara tanah-tanah tersebut.

Pengguna Barang: Informasi tentang pengguna tanah memberi wawasan tentang peruntukan masing-masing tanah. Beberapa tanah digunakan oleh masyarakat, sedangkan yang lainnya dikelola oleh Pamong, dan beberapa lagi untuk tujuan tertentu seperti lembaga pendidikan dan kesehatan. Tahun Perolehan: Data tahun perolehan mengungkapkan sejarah kepemilikan tanah tersebut. Dalam konteks ini, beberapa tanah telah dimiliki sejak tahun 1946, mengindikasikan kelanggengannya dalam kepemilikan desa. Nilai Perolehan: Nilai perolehan adalah gambaran perkiraan nilai ekonomi tanah pada saat diperoleh. Nilai ini menjadi penting dalam pengelolaan aset desa serta dalam pertimbangan potensi pemanfaatan yang menguntungkan.

Tabel ini menggambarkan beberapa pola dan aspek menarik: Beberapa tanah telah dimiliki sejak tahun 1946, mengindikasikan warisan kepemilikan jangka panjang. Ini bisa berhubungan dengan tanah kuburan dan tanah sawah, menunjukkan tradisi dan kontinuitas dalam kepemilikan.

Terdapat variasi dalam penggunaan tanah, termasuk untuk pendidikan, kesehatan, olahraga, dan keperluan umum lainnya. Ini menunjukkan keragaman dalam alokasi sumber daya tanah untuk kepentingan yang berbeda. Ada beberapa tanah yang memiliki keterangan "Kas Lama" dalam nilai perolehan. Ini mungkin merujuk pada nilai historis yang masih relevan dalam konteks pengelolaan saat ini. Kode "Desa" dalam kolom penggunaan mungkin menandakan kepemilikan dan

pengelolaan yang bersifat kolektif, mewakili komunitas desa secara keseluruhan.

Variasi tahun perolehan mencerminkan pertambahan aset tanah seiring berjalannya waktu, mengindikasikan perluasan kepemilikan dan perubahan dalam pengelolaan aset.

Dari analisis ini, terlihat betapa pentingnya pemahaman mendalam tentang tanah kas desa dalam mendukung perencanaan dan pengelolaan yang efektif. Kalurahan Widodomartani dapat memanfaatkan informasi ini untuk memastikan penggunaan optimal dan berkelanjutan dari tanah kas desa untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan wilayah.

BAB III

BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH KALURAHAN (DESA) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (Penelitian kualitatif dengan pendekatan Eksplanasi di Kalurahan Widodomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)

A. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Kalurahan Widodomartani

Pemerintahan desa, sebagai entitas otonom setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih baik dan mandiri. Undang-Undang tersebut memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah kalurahan, termasuk dalam mengelola sumber daya dan menyelenggarakan pembangunan di wilayahnya. Namun, keberhasilan implementasi Undang-Undang Desa tidak hanya tergantung pada kerangka hukum tersebut, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi yang ada di dalam pemerintah kalurahan.

Pemerintah kalurahan, sebagai pelaksana Undang-Undang Desa, memiliki tanggung jawab yang kompleks, mencakup pemastian pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel, serta pengelolaan anggaran kalurahan. Budaya organisasi di pemerintah kalurahan menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan tugas tersebut. Sebagai entitas hidup, budaya organisasi mencerminkan nilai-nilai, norma, dan perilaku yang membentuk cara kerja dan interaksi antar anggota pemerintahan kalurahan.

Budaya organisasi, menurut perspektif Kluckhohn dan Robbins, bukan hanya tentang nilai-nilai yang dipegang, tetapi juga tentang bagaimana nilai-

nilai tersebut diartikulasikan, diekspresikan, dan dijalankan dalam setiap aspek kehidupan organisasi. Dalam konteks pemerintahan kalurahan, budaya organisasi dapat mencakup nilai-nilai, norma-norma, dan tata nilai yang membentuk pandangan bersama terhadap kinerja pemerintah kalurahan. Perubahan struktural dalam pemerintahan desa, terutama melalui pemberlakuan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, memberikan dampak signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Regulasi ini memperjelas kedudukan dan kewenangan di dalam pemerintah desa, memandu pembagian fungsi, tugas, dan tanggung jawab berbagai unit atau jabatan. Dengan adanya perubahan ini, budaya organisasi diharapkan dapat merespons dengan baik, mengakomodasi perubahan, dan tetap menjadi pendorong kinerja yang efektif.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi secara mendalam bagaimana budaya organisasi di pemerintah kalurahan, khususnya di Kalurahan Widodomartani, mempengaruhi kinerja mereka. Pemahaman yang lebih baik tentang interaksi antara budaya organisasi dan pelaksanaan tugas pemerintah dapat memberikan wawasan yang berharga untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat guna. Dengan demikian, pemerintah kalurahan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai semangat Undang-Undang Desa, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, dan mencapai tujuan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut.

Dalam wawancara dengan Bapak Taufiq selaku Carik, ia mengatakan bahwa:

yang saya tauh yaitu adalah kerja sama antara perangkat desa. Kalau soal kerja sama oh kami sangat baik mas, karena misalnya ada kendala di antara kami kami harus saling bertanya dan saling membantu dalam menyelesaikan persoalan mas. Kami selalu berkoordinasi dengan carik, dengan kepala kalurahan dan juga teman-teman yang lain dalam meningkatkan kinerja kami. Kalau budaya organisasi itu yah kami mengikuti nomenklatur yang ada yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Salah satu hal yang tidak boleh itu yah jangan korupsi. Itu memang pekerjaan yang membuat kita bisa celaka mas. (wawancara, tanggal 29 Januari 2024)

Berdasarkan jawaban informan terkait pengaruh budaya organisasi, terlihat bahwa informan memiliki pemahaman yang baik terkait budaya organisasi di kalurahan. Informan menyatakan bahwa salah satu aspek yang dianggap sebagai budaya organisasi adalah kerja sama antara perangkat desa. Informan menekankan pentingnya kerja sama dalam menyelesaikan kendala dan masalah yang timbul di antara mereka. Selain itu, informan juga menyebutkan bahwa kerja sama tersebut melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk carik, kepala kalurahan, dan rekan-rekan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa budaya organisasi di Kalurahan Widodomartani mencakup nilai-nilai kerjasama, koordinasi, dan saling membantu untuk meningkatkan kinerja mereka.

Pentingnya mengikuti nomenklatur yang telah disiapkan oleh pemerintah juga mencerminkan adopsi nilai-nilai dan norma-norma yang diatur oleh aturan resmi. Informan menegaskan bahwa satu hal yang tidak boleh dilakukan dalam budaya organisasi tersebut adalah korupsi. Pernyataan ini mencerminkan pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap aturan sebagai bagian dari budaya organisasi di kalurahan tersebut. Secara keseluruhan, jawaban informan menggambarkan bahwa budaya organisasi di Kalurahan Widodomartani melibatkan nilai-nilai kerja sama, koordinasi, dan integritas, yang semuanya diarahkan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam wawancara dengan Pak Heruyono,ST selaku Lurah, ia mengatakan bahwa:

Kalau manfaat budaya organisasi itu kan kalau kita sudah saling kerja sama yang baik tentu saja semua urusan pemerintah kita bisa selesaikan. Kinerja itu adalah tanggung jawab setiap orang mas. Jadi itu juga nilai tambah bagi kita. Kalau kerja dengan tulus yo pasti semua baik, tapi kalau saling curiga yah tau sendiri kan mas hahaha. Tapi maksud saya kami selalu saling komunikasi untuk melakukan setiap tugas kami. Itu paling penting mas. Tapi kalau mas pulang ke Papua, harus membangun relasi dengan teman-teman di pemerintah desa biar kalau kerja di desa yah bisa menerapkan hal-hal yang baik demi kemajuan papua to? (Wawancara, tanggal 29 Januari 2024)

Dari jawaban informan, terlihat bahwa informan memahami manfaat budaya organisasi, terutama dalam konteks kerja sama yang baik. Informan menyatakan bahwa dengan adanya kerja sama yang baik, segala urusan pemerintahan dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini mencerminkan pemahaman informan terhadap fokus penelitian yang menekankan pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pemerintah kalurahan.

Informan juga menekankan bahwa kinerja merupakan tanggung jawab setiap individu dalam pemerintah kalurahan. Hal ini sesuai dengan konsep bahwa budaya organisasi mencakup nilai-nilai, norma-norma, dan perilaku yang membentuk cara kerja dan interaksi antar anggota organisasi.

Pentingnya kerja dengan tulus dan komunikasi yang baik menjadi nilai tambah, menunjukkan bahwa budaya organisasi di Kalurahan Widodomartani melibatkan aspek-aspek ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Komunikasi yang intensif dianggap sebagai hal yang paling penting oleh informan, sesuai dengan kerangka konseptual yang menyoroti pentingnya komunikasi sebagai bagian dari budaya organisasi. Pertanyaan informan terkait pembangunan relasi dengan teman-teman di pemerintah desa di Papua menunjukkan kesadaran informan akan pentingnya saling berbagi praktik terbaik dan pengalaman antar pemerintah desa. Hal ini sesuai dengan konsep bahwa budaya organisasi tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga dapat melibatkan kolaborasi dan pertukaran ide antar daerah. Dengan demikian, jawaban informan mencerminkan pemahaman yang baik terhadap konsep budaya organisasi, nilai-nilai yang dianut, dan bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi kinerja pemerintah kalurahan, sejalan dengan fokus penelitian yang diusulkan.

Dalam wawancara dengan Bapak Sosilo Widodo selaku Kamituwo, ia mengatakan bahwa:

Kalau di setiap instansi pasti ada yang namanya budaya organisasi mas. Jadi kami selalu memiliki manajemen organisasi yang baik. Apa itu? Ya, kalau misalnya harus melawan aturan demi kepentingan masyarakat dalam hal pelayanan, yah kami bisa melakukan itu. Misalnya, ada

masyarakat yang membutuhkan pelayanan terkait dengan penyewaan tanah atau terkait dengan kesehatan, kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk melayani mereka menggunakan berbagai cara agar mereka bisa segera terbantu. Tetapi kami selalu menjunjung tinggi transparansi dan tanggung jawab dalam mengmban tugas tugas negara mas. Jadi, kalau ada LPJ tahunan yah kami laporkan apa yang ada. Tetapi yang terpenting adalah kesejahteraan masyarakat. (Wawancara tanggal 29 Januari 2024)

Dari jawaban informan, terlihat bahwa informan memahami pentingnya budaya organisasi di setiap instansi, termasuk di dalam pemerintah kalurahan. Informan menyebutkan bahwa mereka selalu memiliki manajemen organisasi yang baik, yang mencerminkan pemahaman tentang kebutuhan untuk memiliki struktur organisasi yang terorganisir dan efisien. Pentingnya manajemen organisasi yang baik juga terkait dengan ketersediaan upaya untuk melawan aturan demi kepentingan masyarakat dalam hal pelayanan. Informan menjelaskan bahwa jika ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan terkait penyewaan tanah atau kesehatan, mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk melayani dengan berbagai cara. Hal ini mencerminkan kesadaran akan fleksibilitas yang mungkin diperlukan dalam menghadapi kebutuhan masyarakat yang beragam.

Namun, informan juga menegaskan bahwa mereka selalu menjunjung tinggi transparansi dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas negara. Penekanan ini sesuai dengan nilai-nilai budaya organisasi yang terkandung dalam kerangka konseptual, di mana budaya organisasi mencerminkan nilai-nilai, norma-norma, dan perilaku yang membentuk cara kerja dan interaksi antar anggota organisasi. Laporan tahunan (LPJ) yang dilakukan oleh informan juga menunjukkan adanya mekanisme akuntabilitas dan transparansi dalam

menjalankan tugas. Meskipun informan menyebut bahwa mereka bisa melawan aturan demi kepentingan masyarakat, hal ini tetap dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, jawaban informan mencerminkan pemahaman yang baik tentang bagaimana budaya organisasi di Kalurahan Widodomartani mencakup manajemen yang baik, keseimbangan antara fleksibilitas dalam pelayanan dan prinsip transparansi serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas negara. Semua ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang menjadi fokus penelitian.

Dalam wawancara dengan Bapak Sigid selaku Kepala Urusan Keuangan, ia mengatakan bahwa:

Budaya organisasi yang terbangun di kalurahan kami ini pada umumnya sudah baik mas. Kinerja yang kami dimiliki oleh semua aparat yang bekerja di sini luar biasa. Mereka selalu meningkatkan kinerja mereka dengan cara mendisiplinkan diri juga selalu belajar terkait dengan hal-hal seperti teknologi dan juga internet. Beberapa di antara kami adalah orang-orang yang berpendidikan sehingga sangat membantu kami dalam pelayanan di desa baik dari segi pelayanan maupun pelatihan. Misalnya, ada situasi yang mendesak terkait dengan pelayanan di desa, kami segera berdiskusi untuk segera mengadakan pelayanan sehingga dapat memudahkan masyarakat. (Wawancara tanggal 29 Januari 2024)

Dari jawaban informan, terlihat bahwa budaya organisasi di Kalurahan Widodomartani dianggap baik secara umum. Informan mencatat bahwa kinerja aparat di kalurahan tersebut dianggap luar biasa, dan mereka aktif dalam meningkatkan kinerja mereka. Peningkatan kinerja tersebut diindikasikan melalui upaya disiplin diri dan komitmen untuk terus belajar terkait teknologi dan internet. Hal ini mencerminkan adaptasi terhadap perkembangan zaman dan

kebutuhan untuk mengikuti perkembangan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pelayanan.

Pentingnya pendidikan di kalurahan juga disoroti oleh informan, yang menyebut bahwa beberapa di antara mereka adalah orang-orang yang berpendidikan. Keberadaan individu berpendidikan di dalam tim pemerintah kalurahan dianggap sebagai aspek yang membantu dalam memberikan pelayanan yang baik dan memberikan pelatihan kepada masyarakat. Ini sesuai dengan fokus penelitian yang mengeksplorasi pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pemerintah kalurahan. Dalam situasi mendesak terkait dengan pelayanan di desa, informan menyebut bahwa mereka segera berdiskusi untuk mengadakan pelayanan yang memudahkan masyarakat. Ini menunjukkan respon yang cepat dan kolaboratif dari aparat pemerintah kalurahan dalam menghadapi tantangan atau kebutuhan mendesak masyarakat.

Secara keseluruhan, jawaban informan mencerminkan aspek-aspek positif dalam budaya organisasi di kalurahan, seperti disiplin, komitmen untuk belajar, keberadaan individu berpendidikan, dan respons yang cepat terhadap kebutuhan masyarakat. Semua ini mendukung peningkatan kinerja dan pelayanan yang efektif, sesuai dengan konsep budaya organisasi yang telah dijelaskan dalam kerangka konseptual.

Dalam wawancara dengan Eviana Rahmawati selaku Kaur Tata Laksana, ia mengatakan bahwa:

Selama ini, yang terjadi di desa kami adalah soal pelayanan. Kalau pelayanan ini amin-main yah kasian dengan masyarakat kita. Dan yang paling fatal adalah kita bisa membuat visi misi desa kita tidak terlaksana. Kan kita bukan menjadi aparat kalurahan selamanya, nanti kan diganti lagi kalau masa jabatan sudah selesai. Oleh karena itu kita harus benar-benar meninggalkan sesuatu yang baik to? Sesuatu yang baik itu yah misalnya bkerja dengan baik dalam melayani masyarakat. Karena kan tidak semua masyarakat dapat kesempatan bekerja sebagai aparat desa kan? Saya ini kalau budaya organisasi gak paham tapi kan pemerintah itu adalah organisasi yah kita selalu menggunakan budaya yang baik supaya bisa bekerja dengan baik juga kan? (Wawancara, tanggal 29 Januari 2024)

Dari jawaban informan, terlihat bahwa informan menekankan pentingnya pelayanan yang baik di desa mereka. Pelayanan yang baik dianggap sebagai hal yang krusial, dan informan menyatakan bahwa jika pelayanan ini hanya dilakukan secara amin-main, itu akan merugikan masyarakat. Poin ini terkait dengan fokus penelitian yang pertama, yaitu "Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pemerintah kalurahan."

Informan juga menyoroti aspek kepemimpinan dan pengelolaan yang efektif, mengindikasikan kesadaran bahwa masa jabatan aparat kalurahan memiliki batasan waktu. Mereka menyadari bahwa mereka tidak akan menjadi aparat kalurahan selamanya dan bahwa kepemimpinan mereka akan digantikan oleh orang lain setelah masa jabatan selesai. Oleh karena itu, mereka merasa perlu meninggalkan sesuatu yang baik, seperti pelayanan yang baik kepada masyarakat. Meskipun informan menyatakan bahwa ia tidak sepenuhnya memahami konsep budaya organisasi, ia menekankan bahwa pemerintahan desa adalah suatu organisasi.

Dalam konteks ini, mereka menyadari pentingnya menggunakan budaya yang baik untuk dapat bekerja dengan baik. Pemahaman ini sesuai dengan konsep budaya organisasi yang didefinisikan dalam kerangka konseptual, di mana budaya organisasi mencerminkan nilai-nilai, norma-norma, dan perilaku yang membentuk cara kerja dan interaksi antar anggota organisasi.

Jawaban informan ini menunjukkan bahwa kesadaran tentang pentingnya pelayanan yang baik dan pemahaman tentang konsep organisasi telah menjadi bagian dari budaya di kalurahan mereka. Ini relevan dengan fokus penelitian yang mengeksplorasi pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pemerintah kalurahan, terutama dalam konteks pelayanan kepada masyarakat.

Dalam wawancara dengan Taufiq selaku selaku Carik, ia mengatakan bahwa:

Mas, udah tau kan, kalau penyelenggaraan pemerintahan itu benar-benar kita harus kejar target untuk bisa menjadi pemerintah yang baik. Jadi di antara kami semua yang direkrut untuk bekerja sebagai bagian dari desa adalah orang-orang terpilih yang bertanggung jawab untuk semua urusan pemerintah di kalurahan karena kami digaji oleh negara. Oleh karena itu, ini tidak main-main mas. Kami bekerja dengan segala kekurangan kami untuk melayani masyarakat. Kalau ada masyarakat yang tidak puas dengan pelayanan kami maka itu adalah catatan bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan di kalurahan. Poin utama yang disoroti adalah bahwa mereka dianggap sebagai orang-orang terpilih yang bertanggung jawab atas semua urusan pemerintah di kalurahan, dan mereka digaji oleh negara. Hal ini mencerminkan kesadaran akan tanggung jawab yang besar sebagai bagian dari pemerintahan desa, dan hal ini sesuai dengan latar belakang penelitian yang mencatat peran sentral pemerintahan kalurahan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang mengarah pada pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.(Wawancara, tanggal 29 Januari 2024)

Pernyataan bahwa mereka bekerja dengan segala kekurangan untuk melayani masyarakat mencerminkan komitmen dan dedikasi untuk memberikan pelayanan yang baik. Ini dapat dikaitkan dengan fokus penelitian yang pertama, yaitu "Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pemerintah kalurahan," di mana budaya organisasi dapat memengaruhi kinerja pemerintah kalurahan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang efisien dan efektif.

Selanjutnya, informan menyebutkan bahwa ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan mereka dianggap sebagai catatan untuk dievaluasi demi perbaikan. Ini mencerminkan sikap responsif dan terbuka terhadap umpan balik masyarakat. Respon yang cepat terhadap masukan dan kritik dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan dan memperbaiki kekurangan yang mungkin ada. Hal ini relevan dengan fokus penelitian yang mengeksplorasi hubungan antara budaya organisasi dan kinerja pemerintah kalurahan.

B. Manfaat Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Membentuk Budaya Organisasi

Pemerintahan di tingkat kalurahan memiliki peran yang krusial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai landasan hukum, pemerintah kalurahan diberikan tanggung jawab untuk mengatur, membina, dan memimpin wilayahnya. Dalam menjalankan tugas dan wewenang ini, terdapat harapan besar agar pemerintah kalurahan dapat mensejahterakan masyarakatnya. Dalam konteks ini, budaya organisasi di kalurahan memiliki peran yang sangat penting,

karena dapat membentuk nilai-nilai, norma, dan perilaku yang membimbing cara kerja dan interaksi antaranggota pemerintahan kalurahan.

Budaya organisasi dapat dipahami melalui perspektif holistik, variabel, dan kognitif, sesuai dengan konsep Kluckhohn. Dalam konteks kalurahan, perspektif holistik mencakup nilai-nilai, norma-norma, dan tata nilai yang membentuk pandangan kolektif anggota organisasi terhadap kinerja pemerintah kalurahan. Perspektif variabel menyoroti ekspresi budaya melalui simbol-simbol, ritus, dan praktik-praktik sehari-hari di dalam organisasi. Perspektif kognitif menekankan pemahaman bersama mengenai gagasan, konsep, keyakinan, nilai, dan norma dalam pikiran anggota organisasi. Budaya organisasi juga memiliki fungsi penting dalam konteks pemerintahan kalurahan. Fungsi-fungsi tersebut mencakup menetapkan tapal batas, memberikan identitas bagi anggota organisasi, memudahkan timbulnya komitmen terhadap tujuan bersama, meningkatkan kemantapan sistem sosial, dan berperan sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali. Dalam konteks Undang-Undang Desa, budaya organisasi tidak hanya menjadi panduan nilai, tetapi juga membentuk dasar etis yang mendorong perilaku etis di berbagai tingkatan organisasi.

Kalurahan Widodomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan representasi dari kerangka hukum Undang-Undang Kalurahan di tingkat lokal. Dalam mengaitkan penelitian ini dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemahaman mendalam terhadap budaya organisasi di pemerintah kalurahan menjadi krusial. Pemahaman ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman

yang lebih baik tentang peran budaya organisasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pemerintah kalurahan sesuai dengan amanat undang-undang tersebut. Fokus penelitian yang pertama adalah mengenai pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pemerintah kalurahan. Dalam hal ini, budaya organisasi mencakup pola keyakinan dan nilai-nilai yang dipegang oleh anggota organisasi, membentuk dasar aturan berperilaku dalam organisasi. Jawaban dari informan menunjukkan bahwa kerja sama antara perangkat desa menjadi aspek penting dalam budaya organisasi di Kalurahan Widodomartani. Koordinasi, saling bertanya, dan saling membantu dalam menyelesaikan persoalan merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Adanya nomenklatur yang sudah disiapkan oleh pemerintah dan larangan terhadap korupsi menjadi bagian dari budaya organisasi yang dibangun.

Fokus penelitian yang kedua menyoroti manfaat penyelenggaraan pemerintahan dalam membentuk budaya organisasi. Penyelenggaraan pemerintahan di kalurahan tidak hanya tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, tetapi juga melibatkan penerapan nilai-nilai dalam budaya organisasi. Aspek-aspek seperti komunikasi, koordinasi, pengelolaan sumber daya, pengawasan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk budaya organisasi yang kuat. Dalam konteks ini, informan menyoroti bahwa penyelenggaraan pemerintahan memberikan wadah untuk menerapkan nilai-nilai seperti transparansi, tanggung jawab, dan partisipasi dalam budaya organisasi. Proses komunikasi dan koordinasi di antara anggota pemerintah kalurahan menciptakan pola interaksi

positif dan mendukung budaya organisasi yang kuat. Pemberlakuan regulasi seperti Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menjadi landasan kuat untuk mengatur struktur organisasi dan kewenangan pemerintah desa, dengan harapan meningkatkan efektivitas dan transparansi pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara budaya organisasi, penyelenggaraan pemerintahan, dan kinerja pemerintah kalurahan di tingkat lokal, serta memberikan kontribusi pada pembuatan kebijakan yang lebih tepat guna dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan di tingkat kalurahan.

Dalam wawancara dengan bapak Heruyono, ST selaku Lurah, ia mengatakan bahwa:

Begini mas, kalau manfaat penyelenggaraan pemerintah itu kan untuk membuat pemerintahan kita bersih dan baik. Jadi kalau kami bekerja dengan baik dengan sendirinya kami sudah melakukan penyelenggaraan pemerintah dengan baik. Sehingga budaya organisasi itu kan selalu kami bangun dengan baik antara sesama anggota pemerintah kalurahan. Salah satu contohnya adalah ketika kami melayani masyarakat dengan tidak memandang bulu bahwa tugas kami adalah untuk melayani banyak orang tanpa mebeda-bedakan. Itu merupakan budaya yang baik yang perlu ditingkatkan apalagi kita orang jawa selalu menjunjung tinggi budaya gitu mas. (Wawancara, tanggal 29 Januari 2024)

Dalam jawaban informan, tergambar pemahaman yang kokoh mengenai hubungan antara manfaat penyelenggaraan pemerintahan, budaya organisasi, dan kinerja pemerintah kalurahan. Informan menyoroti beberapa aspek penting dalam konteks ini. Pertama-tama, informan menegaskan bahwa manfaat dari penyelenggaraan pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik. Terdapat pemahaman yang jelas bahwa kualitas

penyelenggaraan pemerintahan berkontribusi langsung pada keberhasilan pemerintah kalurahan dalam mencapai tujuan-tujuan strategis. Selanjutnya, informan menciptakan keterkaitan erat antara kinerja pemerintah dan budaya organisasi. Mereka menyatakan bahwa kinerja yang baik secara otomatis mencerminkan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Ini mencirikan pemahaman akan pentingnya keterkaitan antara tugas dan tanggung jawab individu dengan pencapaian tujuan penyelenggaraan yang lebih besar.

Pentingnya budaya organisasi juga tergambar dalam jawaban informan. Mereka menyampaikan keinginan untuk membangun budaya organisasi yang baik antara sesama anggota pemerintah kalurahan. Ini mencerminkan kesadaran akan peran kritis budaya organisasi dalam membentuk perilaku dan interaksi di dalam pemerintah kalurahan. Informan juga memberikan contoh konkret mengenai budaya organisasi yang positif, yaitu pelayanan tanpa memandang bulu. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti pelayanan yang adil dan tanpa diskriminasi diintegrasikan dalam budaya organisasi kalurahan.

Pentingnya penghormatan terhadap budaya lokal juga tergambar dalam jawaban informan. Mereka menyebutkan bahwa sebagai orang Jawa, mereka selalu menjunjung tinggi budaya. Ini dapat diartikan sebagai upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai tradisional Jawa dalam konteks pekerjaan dan pelayanan publik. Terakhir, jawaban informan mencerminkan kesadaran akan pentingnya pembangunan budaya organisasi yang baik. Mereka menunjukkan bahwa membangun budaya organisasi yang positif merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang

efisien dan mendukung di dalam pemerintah kalurahan. Secara keseluruhan, jawaban informan menciptakan gambaran yang holistik dan mendalam mengenai hubungan yang kompleks antara manfaat penyelenggaraan pemerintahan, budaya organisasi, dan kinerja pemerintah kalurahan. Hal ini sejalan dengan kerangka konseptual yang menekankan bahwa budaya organisasi dapat menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah kalurahan.

Dalam wawancara dengan Ibu Haryanti selaku Tokoh Masyarakat, ia mengatakan bahwa:

Manfaat penyelenggaraan pemerintah itu soal bagaimana kita memanfaatkan kemampuan kita dalam melayani dan juga bekerja secara tulus di desa. Pasti di daerah mas juga sama. Pemerintah desa kan melayani masyarakat dengan baik to. Kalau gak baik yah gimana mau menjadi pemerinta yang baik. Kami di kalurahan widodomartani ini selalu bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga dapat meningkatkan kinerja yang baik di antara kami. Tapi budaya organisasi itu kan pemerintahan juga adalah salah satu organisasi to? Jadi yah kami menjalankan organisasi ini dengan penuh tanggung jawab apalgi kita enerima uang negara untuk bekerja melayani masyarakat. (Wawancara, tanggal 29 Januari 2024)

Informan dalam jawabannya menunjukkan pemahaman yang solid tentang hubungan antara manfaat penyelenggaraan pemerintahan, kinerja, dan budaya organisasi. Pemahaman ini tercermin dalam pengakuan mereka terhadap pentingnya melayani masyarakat dengan baik dan menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dengan tanggung jawab. Berikut adalah narasi singkat yang merangkum analisis jawaban informan: Informan dengan jelas

menyampaikan pemahaman yang kuat tentang pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk melayani masyarakat dengan tulus. Mereka menyadari bahwa kinerja pemerintah desa memiliki dampak langsung pada kehidupan masyarakat setempat. Pemahaman ini selaras dengan latar belakang penelitian yang mengeksplorasi pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pemerintah kalurahan.

Dalam menjawab pertanyaan tentang budaya organisasi, informan menunjukkan pemahaman bahwa pemerintahan desa juga merupakan suatu bentuk organisasi. Mereka mengaitkan tanggung jawab dan aturan yang harus diikuti dengan meningkatkan kinerja. Pemahaman ini selaras dengan kerangka konseptual yang menekankan peran budaya organisasi dalam membentuk pandangan bersama, nilai, dan norma di dalam organisasi. Pentingnya budaya organisasi dalam konteks pemerintahan desa dijelaskan oleh informan melalui penerapan aturan dan norma sebagai bagian dari kinerja yang baik. Mereka menyoroti pentingnya disiplin dan pematuhan terhadap tata nilai yang telah ditetapkan. Pemahaman ini mencerminkan konsep budaya organisasi sebagai pedoman perilaku yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan.

Selain itu, informan juga menunjukkan kesadaran akan tanggung jawab moral dan etis sebagai penerima uang negara. Mereka mengaitkan penerimaan dana publik dengan kewajiban untuk bekerja dengan baik dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat. Pemahaman ini sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan transparansi yang terkait dengan penyelenggaraan

pemerintahan yang baik. Secara keseluruhan, informan menggambarkan keterkaitan yang erat antara penyelenggaraan pemerintahan, kinerja, dan budaya organisasi dalam konteks pemerintahan desa. Jawaban mereka mencerminkan keselarasan dengan latar belakang, fokus penelitian, dan kerangka konseptual yang telah diperkenalkan sebelumnya.

Dalam wawancara dengan Ibu Eviana Rahmayati selaku Kaur Tata Laksana, ia mengatakan bahwa:

Sejauh ini, mafaat penyelenggaraan pemerintah yah untuk kebaikan bersama mas. Jadi penyelenggaraan pemerintah itu memang mesti ada manfaatnya. Kalau gak ada manfaatnya ngapain ada pemerintah to mas. Tapi yang paling penting yo kita bekerja dalam menjalankan tugas pemerintah, kan kita bagian dari pemerintah sehingga kita bekerja tidak terlepas dari budaya organisasi atau budaya yang kita bangun dalam pemerintahan kita. Oleh karena itu mas, kalau manfaat budaya organisasi itu soal bagaimana kita mengembangkan kinerja kita dalam meningkatkan pemerintah yang baik mas. (Wawancara, tanggal 29 Januari 2024)

Informan dalam jawabannya menekankan keterkaitan antara penyelenggaraan pemerintahan, budaya organisasi, dan kinerja pemerintah di tingkat kalurahan. Berikut narasi yang menggambarkan analisis jawaban informan: Informan dengan tegas menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus memberikan manfaat yang konkret bagi kebaikan bersama. Mereka menyakini bahwa eksistensi pemerintahan harus diukur melalui dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat. Pemahaman pragmatis ini mencerminkan pandangan utilitarianisme terhadap peran pemerintahan dalam melayani dan memberikan manfaat kepada warganya.

Selain itu, informan menyadari bahwa dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan di kalurahan, mereka tidak dapat terlepas dari pengaruh budaya organisasi yang telah terbentuk di lingkungan kerja mereka. Mereka mengakui bahwa budaya organisasi menjadi bagian integral dari aktivitas sehari-hari dalam pemerintahan. Pemahaman ini sesuai dengan konsep budaya organisasi yang diperkenalkan dalam kerangka konseptual penelitian. Informan juga menyoroti peran budaya organisasi dalam meningkatkan kinerja pemerintah. Mereka menyimpulkan bahwa bagaimana budaya organisasi dibangun dan dijaga akan berdampak langsung pada pencapaian tujuan dan kualitas pelayanan pemerintah kalurahan. Pemahaman ini sejalan dengan konsep bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku dan kinerja individu dalam sebuah organisasi.

Pernyataan informan mencerminkan keyakinan bahwa budaya organisasi sangat relevan dalam konteks pemerintahan lokal di kalurahan. Mereka mengakui bahwa bekerja di tingkat kalurahan memerlukan pemahaman dan pengakuan terhadap budaya organisasi yang ada, serta bahwa budaya tersebut dapat memandu tindakan mereka dalam mencapai tujuan pemerintahan yang baik. Pemahaman ini selaras dengan fokus penelitian yang mengeksplorasi pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pemerintah di tingkat kalurahan. Dengan demikian, jawaban informan memberikan gambaran konkret tentang bagaimana mereka memandang hubungan yang kompleks antara penyelenggaraan pemerintahan, budaya organisasi, dan kinerja pemerintah di tingkat kalurahan. Pemahaman dan pandangan mereka memberikan kontribusi

yang signifikan terhadap pemahaman lebih lanjut tentang dinamika ini dalam konteks pemerintahan lokal.

Dalam wawancara dengan Susilo Widodo selaku Kamitua ia mengatakan bahwa:

Penyelenggaraan pemerintah itu kan menjalankan tugas-tugas sebagai pemerintahan. Kalau manfaatnya yah untuk melayani masyarakat. Kalau budaya organisasi itu kan soal kekompakan kita selama ini. Jadi kalau kita bekerja tanpa kekompakan atau kerja sama yang baik yo sama aja mas sehingga perlu adanya saling kebergantungan atau kolaborasi yang baik natar sesama yang bekerja sebagai penyelenggara pemerintah. Dulu, mungkin orang bekerja sendiri-sendiri demi kepentingan pribadinya, tapi di era demokrasi ini yah kita harus saling menerima satu samalain sambil bekerja bersama demi kepentingan umum. Sejauh ini, kam di kalurahan widodomartani selalu bekerja sama tapi yah ada juga orang tertentu yang masih merasa tidak nyaman dengan kebersamaan tapi itu selalu kita pahami, mungkin ia memiliki alasan pribadinya sendiri. (Wawancara, tanggal 29 Januari 2024)

Analisis jawaban informan menunjukkan pemahaman yang jelas tentang hubungan antara penyelenggaraan pemerintah, manfaatnya, dan peran budaya organisasi. Berikut narasi yang menggambarkan analisis jawaban informan: Informan menggambarkan bahwa penyelenggaraan pemerintah memiliki tujuan utama, yaitu melayani masyarakat. Pandangan ini mencerminkan pemahaman bahwa pemerintahan, terutama di tingkat kalurahan, memiliki peran utama dalam memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kesadaran akan tujuan ini penting dalam konteks pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan. Selanjutnya, informan menyatakan bahwa manfaat dari penyelenggaraan pemerintah adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pemahaman ini sejalan dengan konsep bahwa penyelenggaraan pemerintah harus menghasilkan manfaat nyata bagi warga. Manfaat yang

dimaksud melibatkan efektivitas dan efisiensi dalam memberikan layanan kepada masyarakat, mencerminkan aspirasi pemerintahan yang baik.

Dalam konteks budaya organisasi, informan menyoroti kekompakan dan kerja sama sebagai unsur kunci. Mereka menyadari bahwa tanpa kekompakan dan kerja sama yang baik di antara anggota pemerintah kalurahan, upaya penyelenggaraan pemerintah bisa terhambat. Pemahaman ini mencerminkan konsep budaya organisasi sebagai faktor penting dalam mencapai tujuan pemerintahan. Dalam menggambarkan situasi di kalurahan Widodomartani, informan mencatat adanya keragaman sikap terhadap kebersamaan. Mereka mengakui bahwa meskipun sebagian besar anggota pemerintah bekerja sama dengan baik, ada beberapa individu yang mungkin merasa tidak nyaman dengan kebersamaan. Pemahaman ini menunjukkan kesadaran terhadap diversitas individual di dalam organisasi.

Kesimpulannya, jawaban informan mencerminkan pemahaman yang holistik tentang peran penyelenggaraan pemerintah, manfaat yang dihasilkan, dan peran budaya organisasi dalam mencapai tujuan tersebut. Informan menyadari pentingnya kolaborasi dan kekompakan dalam konteks pemerintahan lokal, sambil mengakui adanya perbedaan individu yang perlu dihormati. Analisis ini memberikan wawasan yang berharga terkait dinamika internal dalam pemerintahan kalurahan dan sejauh mana budaya organisasi berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pemerintahan.

Dalam wawancara dengan Bapak Sigid selaku kepala urusan keuangan, ia mengatakan bahwa:

Manfaat budaya organisasi yang kami jalani di Kalurahan Widodomartani itu yah soal bagaimana kami selalu menjadi satu kesatuan dalam lingkup pemerintah desa dalam menjalani semua urusan pemerintah desa. Kami memiliki kepala desa yang selalu punya manajemen organisasi atau pemerintahan yang baik sehingga kami selalu diajak untuk bekerja sama. Kepala desa kami itu orangnya selalu memiliki nilai sosial yang tinggi ya mas sehingga kami yang di bawahnya selalu harus mengikuti contoh dari beliau. (Wawancara, tanggal 29 Januari 2024)

Informan dari Kalurahan Widodomartani memberikan gambaran positif tentang budaya organisasi yang terbangun di lingkungan pemerintahan desa. Berikut adalah narasi dari jawaban informan: Dalam konteks Kalurahan Widodomartani, budaya organisasi diukur melalui sejumlah elemen yang menciptakan kesatuan dan keselarasan dalam menjalankan tugas pemerintahan desa. Informan menekankan peran kunci kepala desa sebagai pemimpin dan pengelola organisasi. Kepala desa tidak hanya dianggap memiliki manajemen organisasi yang baik, tetapi juga membawa nilai-nilai sosial yang tinggi ke dalam struktur pemerintahan desa.

Kesatuan di antara anggota pemerintah desa diakui sebagai hasil dari budaya organisasi yang telah terbentuk. Budaya ini menciptakan identitas bersama dan rasa keanggotaan yang kuat di kalangan aparat desa. Pemahaman ini sejalan dengan perspektif bahwa budaya organisasi mencakup nilai-nilai, norma-norma, dan tata nilai yang membentuk pandangan bersama terhadap kinerja pemerintah kalurahan. Pentingnya kepemimpinan yang baik dan

pengaruh kepala desa sebagai teladan muncul sebagai tema krusial. Kepala desa tidak hanya berperan dalam menyusun manajemen organisasi yang efisien tetapi juga menjadi figur yang memberikan contoh dan inspirasi. Kehadiran nilai-nilai sosial yang tinggi pada kepala desa menjadi pendorong bagi anggota pemerintah desa untuk mengikuti jejak dan menciptakan budaya organisasi yang positif. Selain itu, informan menyoroti pentingnya bekerja tanpa memandang bulu dalam melayani masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa budaya organisasi di Kalurahan Widodomartani mendorong kesetaraan dalam pelayanan dan menekankan prinsip-prinsip keadilan. Keterbukaan terhadap kebutuhan masyarakat tanpa diskriminasi menjadi bagian integral dari budaya organisasi yang mereka bangun.

Secara keseluruhan, jawaban informan mencerminkan bahwa budaya organisasi di Kalurahan Widodomartani bukan hanya menjadi landasan struktural tetapi juga sebuah norma yang terinternalisasi dalam setiap tindakan pemerintah desa. Budaya ini diwarnai oleh kesatuan, kepemimpinan yang baik, dan nilai-nilai moral yang diterapkan dalam pelayanan kepada masyarakat.

C. Kerjasama Antara Elemen Pemerintah Kalurahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Budaya Organisasi

Fokus penelitian pada kerjasama antara elemen pemerintah kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis budaya organisasi memiliki latar belakang yang terkait erat dengan kerangka konseptual yang telah dibangun. Berikut adalah latar belakang untuk fokus penelitian ini: Budaya organisasi, sebagaimana dijelaskan dalam kerangka konseptual, mencakup nilai-nilai,

norma-norma, dan tata nilai yang membentuk pandangan kolektif anggota organisasi terhadap kinerja pemerintah kalurahan. Tiga perspektif utama budaya organisasi (perspektif holistik, perspektif variabel, dan perspektif kognitif) memandang budaya sebagai sistem terpola yang mencakup cara berpikir, menggunakan perasaan, dan bereaksi secara keseluruhan, serta menyoroti bagaimana budaya diekspresikan melalui simbol-simbol, ritus, dan pemahaman bersama tentang gagasan dan konsep.

Dalam konteks ini, kerjasama antara elemen pemerintah kalurahan menjadi faktor kritis yang memengaruhi implementasi budaya organisasi. Keterlibatan dan kolaborasi antara berbagai elemen pemerintah desa, seperti kepala desa, carik, dan elemen lainnya, menjadi penentu utama dalam menerapkan budaya organisasi yang memiliki dampak positif terhadap kinerja pemerintah kalurahan. Penerapan budaya organisasi yang baik dapat menciptakan kerja sama yang harmonis, meningkatkan efisiensi, dan memastikan tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu, melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman lebih dalam mengenai bagaimana kerjasama antara elemen-elemen pemerintah kalurahan berbasis budaya organisasi dapat memengaruhi kinerja pemerintah desa. Terkait dengan fungsi budaya organisasi yang telah diuraikan dalam kerangka konseptual, seperti menciptakan identitas, meningkatkan kemantapan sistem sosial, dan menjadi mekanisme pembuat makna, kerjasama antara elemen pemerintah kalurahan diharapkan menjadi kontributor utama dalam penerapan dan pemeliharaan budaya organisasi yang positif. Sehingga, melalui pemahaman yang lebih

mendalam terkait kerjasama antara elemen pemerintah kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis budaya organisasi.

Kalurahan Widodomartani, Kapanwon Ngemplak, Kabupaten Sleman, menjadi fokus analisis untuk memahami bagaimana elemen-elemen pemerintah desa menjalankan penyelenggaraan pemerintahan berbasis budaya organisasi. Budaya organisasi di Kalurahan Widodomartani tercermin melalui perspektif holistik, variabel, dan kognitif. Identitas bersama, yang mencakup nilai-nilai, norma-norma, dan tata nilai, membentuk pandangan kolektif anggota terhadap kinerja pemerintah desa. Sebagai bagian dari Kabupaten Sleman, Kalurahan ini mengikuti regulasi dan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, khususnya Permendagri No. 84 Tahun 2015. Penyesuaian struktur organisasi dan kewenangan pemerintahan desa menjadi penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Fokus utama pemerintahan desa, termasuk Kalurahan Widodomartani, adalah pelayanan kepada masyarakat. Kinerja diukur dari sejauh mana mereka memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga transparansi serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Dalam wawancara dengan Bapak Heryono selaku lurah, ia mengatakan bahwa:

Kerja sama antara kami semua di dalam pemeritah desa ini sangat baik mas. Kalau soal hubungan kerja administratif, kami di kalurahan Widodomartani selalu mengedepankan kekeluargaan sehingga kami bisa menyelesaikan visi misi kepala desa yang sudah ada. Saya pikir semua daerah sama seperti itu. Tetapi kalau bertanya kepada saya maka kami sudah dengan tegas menjalankan semua dengan penuh tanggung jawab bersama. Kecuali yah, setiap orang bekerja sesuai tupoksi masing-masing sehingga tidak boleh saling mengganggu. (Wawancara, tanggal 29 Januari 2024)

Jawaban dari informan mencerminkan atmosfer kerja yang positif di Kalurahan Widodomartani, khususnya dalam hal kerjasama antar elemen pemerintah desa. Berikut adalah gambaran naratifnya: Dalam konteks pemerintah desa di Kalurahan Widodomartani, kerja sama di antara anggota pemerintah terbentuk dengan baik. Hubungan kerja administratif dijalin dengan prinsip kekeluargaan, menciptakan atmosfer yang hangat dan bersahabat di dalam tim pemerintah desa. Poin ini mencerminkan pandangan holistik dan variabel dalam konsep budaya organisasi, di mana pentingnya interaksi yang terpola dan cara berpikir bersama memainkan peran kunci. Dalam menjalankan visi dan misi kepala desa, kekeluargaan dianggap sebagai fondasi yang kuat. Seluruh anggota pemerintah desa bekerja dengan tegas dan penuh tanggung jawab bersama, menghadirkan nilai-nilai budaya organisasi yang menjadi panduan dalam setiap tindakan mereka. Keharmonisan ini tercermin dalam pemahaman bersama mengenai tugas dan tanggung jawab, sesuai dengan perspektif kognitif dalam budaya organisasi.

Meskipun menekankan kerja sama dan kebersamaan, informan juga menyebutkan bahwa setiap anggota pemerintah desa diharapkan untuk bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing tanpa saling mengganggu. Ini menunjukkan bahwa, meskipun ada kebersamaan, tetap ada batasan dan struktur dalam pelaksanaan tugas, sesuai dengan perspektif variabel dalam konsep budaya organisasi. Secara keseluruhan, Kalurahan Widodomartani membentuk budaya organisasi yang positif dan memberdayakan, di mana nilai-nilai seperti kekeluargaan, tanggung jawab bersama, dan pemahaman tugas

bersama-sama menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan saling mendukung.

Dalam wawancara dengan ibu Haryati selaku tokoh masyarakat, ia mengatakan bahwa:

Kalau soal kerja sama antara pemerintah desa, tentu saja kami sangat menjunjung tinggi kerja sama mas. Kerja sama ini kan berlaku bagi setiap organisasi pemerintahan. Bayangkan kalau tidak ada kerja sama antara pemerintahan bagaimana mungkin kita mau maju? Kami di sini sudah ada semacam briefing dari semua elemen biar bisa saling bangun kerja sama yang baik. Tetapi kalau ada yang gak mau kerja sama yah itu tanggung jawabnya sendiri. Tetapi sejauh ini yah seperti yang dilihat mas, kami selalu kerja sama. Masuk kantor aja sama-sama kecuali yang sakit biasanya izin atau lapor ke kepala kalurahan. (Wawancara, tanggal 29 Januari 2024)

Jawaban informan mencerminkan pentingnya kerja sama antara elemen pemerintah desa di dalam mengelola tugas-tugas pemerintahan. Berikut adalah analisisnya: Informan menegaskan bahwa kerja sama di antara pemerintah desa sangat dijunjung tinggi dan dianggap sebagai landasan utama bagi setiap organisasi pemerintahan. Pernyataan ini sesuai dengan fokus penelitian terkait kerjasama antara elemen pemerintah kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis budaya organisasi.

Terkait perspektif budaya organisasi, informan menyebutkan adanya semacam briefing dari semua elemen. Hal ini mencerminkan upaya untuk membangun pemahaman bersama, nilai-nilai, dan tujuan yang menjadi dasar budaya organisasi di kalurahan. Briefing tersebut dapat dilihat sebagai bentuk implementasi perspektif kognitif dalam budaya organisasi, di mana pemahaman bersama terhadap gagasan, konsep, nilai, dan norma diorganisasikan. Meskipun ditekankan bahwa kerja sama sangat diutamakan, informan juga menyebutkan

bahwa ada tanggung jawab individual bagi mereka yang tidak mau berpartisipasi dalam kerja sama. Hal ini mencerminkan adanya batasan atau konsekuensi bagi individu yang tidak mendukung budaya kerja sama yang dianut oleh pemerintah desa.

Selain itu, informan memberikan contoh konkret terkait kerja sama, yaitu kehadiran bersama di kantor. Hal ini mencerminkan aspek praktis dari kerja sama, di mana kebersamaan diwujudkan dalam tindakan sehari-hari seperti masuk kantor bersama-sama. Tindakan ini dapat dilihat sebagai implementasi dari perspektif variabel dalam budaya organisasi, yaitu bagaimana budaya diekspresikan melalui simbol-simbol dan praktik-praktik sehari-hari di dalam organisasi. Secara keseluruhan, jawaban informan mencerminkan adanya budaya kerja sama yang diakui dan diterapkan di kalurahan, sejalan dengan konsep budaya organisasi dan kerangka konseptual yang telah dirinci sebelumnya.

Dalam wawancara dengan ibu Marrati selaku Tokoh Lembaga Masyarakat, ia mengatakan bahwa:

Kalau dulu, orang kerja sama itu kurang karena masih mementingkan diri sendiri tapi kalau sekarang sistem mengharuskan kita kerja sama mas. Misalnya, kalau kita di bagian pemerintahan harus bekerja sama dengan semua seperti BUMDEsa, PKK, Karang Taruna, dan semua elemen pemerintah desa. Karena kita bekerja berdasarkan aturan pemerintah sehingga semua harus bersinergi untuk bekerja sama. Karena memang kita hanya punya visi-misi yang sama tidak ada yang lain. Masalahnya adalah, kalau setiap kasi kan bekerja sesuai apa yang diminta. Begitu juga padukuhan dan RT/RW kan setiap tugas memiliki fungsinya masing-masing, tetapi semua demi kepentingan masyarakat desa. (Wawancara, tanggal 29 Januari 2024)

Informan menunjukkan pemahaman yang baik tentang perubahan paradigma kerja sama dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa. Dulu, kerja sama kurang ditekankan karena banyak yang mementingkan diri sendiri. Namun, sekarang, informan menyadari bahwa kerja sama menjadi keharusan, terutama dalam konteks pemerintahan desa. Kerja sama tidak hanya terjadi di antara anggota pemerintahan desa, melainkan melibatkan berbagai elemen seperti BUMDEsa, PKK, Karang Taruna, dan elemen pemerintah desa lainnya. Informan menekankan bahwa aturan pemerintah mewajibkan sinergi di antara berbagai unsur di pemerintahan desa, dan sinergi ini diharapkan dapat menciptakan kerja sama yang optimal untuk mencapai visi-misi yang sama.

Pentingnya visi-misi bersama menjadi sorotan, menunjukkan bahwa keselarasan nilai dan tujuan menjadi dasar bagi kerja sama lintas elemen pemerintah desa. Meskipun setiap unsur memiliki tugas dan fungsi masing-masing, semuanya diarahkan untuk mencapai kepentingan masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan konsep kerangka konseptual, di mana kerja sama antara elemen pemerintah desa harus mengoptimalkan peran dan fungsionalitas masing-masing unsur. Jawaban informan mencerminkan kesadaran akan pentingnya kerja sama lintas elemen pemerintah desa dalam mencapai kinerja pemerintahan yang baik. Hal ini sesuai dengan fokus penelitian tentang kerjasama antara elemen pemerintah kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis budaya organisasi.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa informan menekankan bahwa kerja sama di pemerintahan desa tidak hanya terbatas pada hubungan administratif, melainkan mencakup aspek kekeluargaan. Adanya kekeluargaan dalam hubungan kerja dapat memperkuat rasa solidaritas dan saling mendukung di antara anggota pemerintahan desa. Poin ini mencerminkan pentingnya aspek sosial dan hubungan personal dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Selain itu, informan menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab bersama dalam menjalankan visi misi kepala desa. Ini menggambarkan bahwa tidak hanya kesepakatan formal yang diikuti, tetapi juga komitmen pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Konsep ini sejalan dengan fokus penelitian tentang kerjasama antara elemen pemerintah kalurahan, yang mencakup tanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Informan juga mengungkapkan bahwa setiap orang di pemerintahan desa memiliki tupoksi atau tugas dan fungsi masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama diarahkan sesuai dengan spesifik fungsi dan tanggung jawab, menghindari tumpang tindih dan memastikan efisiensi dalam pelaksanaan tugas. Konsep ini sejalan dengan prinsip-prinsip manajemen organisasi yang baik. Selanjutnya, informan menyampaikan bahwa dulu, orang mungkin kurang mau bekerja sama karena lebih fokus pada kepentingan pribadi. Namun, perubahan paradigma menuju demokrasi menuntut kerja sama dan saling mendukung untuk kepentingan umum. Pemahaman ini mencerminkan respons terhadap perubahan konteks dan tuntutan demokrasi yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan kerja sama di semua

tingkatan pemerintahan. Secara keseluruhan, jawaban informan mencerminkan pemahaman yang baik tentang nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam kerangka konseptual penelitian. Kerja sama antara elemen pemerintah kalurahan dilihat sebagai fondasi untuk pencapaian tujuan bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berbasis budaya organisasi.

Dalam wawancara dengan Bapak Taufik selaku sekretaris desa, ia mengatakan bahwa:

Kalau soal kerja sama yah itu udah pasti mas. Tapi kerja sama ini kan bukan untuk nyontek pekerjaan teman tapi harus saling belajar kan? Saya pikir di kuliah juga begitu. Untuk membangun budaya organisasi itu kan harus ada kelompok dulu. Nah pemerintah desa ini kan sebagai sebuah organisasi makanya kita harus bangun kerja sama dengan baik kan? Sejauh ini kalurahan Widodomartani ini memiliki kebiasaan untuk kerja sama antara pemerintah maupun masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan apa yah kita ikut tetapi kita saling berkoordinasi atau melakukan musyawarah untuk menjawab permintaan masyarakat dan kemudian ada pemerintah BPD dan semua elemen untuk membahasnya. (Wawancara, tanggal 29 Januari 2024)

Dalam analisis mendalam terhadap jawaban informan, tergambar gambaran yang matang tentang konsep kerja sama dan budaya organisasi dalam konteks pemerintahan desa, khususnya di Kalurahan Widodomartani, Ngemplak, Kabupaten Sleman. Beberapa aspek kunci yang bisa diidentifikasi dari jawaban tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, informan menunjukkan pemahaman yang kuat tentang esensi kerja sama. Kerja sama tidak hanya dipandang sebagai pembagian tugas, tetapi lebih sebagai peluang untuk saling belajar. Analogi dengan situasi kuliah menggambarkan pandangan bahwa kerja sama membawa manfaat tidak hanya dalam pemenuhan tugas, tetapi juga dalam pertumbuhan individu dan kolektif.

Kedua, kerja sama dianggap sebagai landasan utama dalam pembentukan budaya organisasi yang positif. Dalam konteks pemerintahan desa, ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya hubungan yang baik antara elemen-elemen pemerintah kalurahan. Kerja sama bukan hanya dilihat sebagai strategi taktis, tetapi sebagai nilai fundamental yang membentuk cara kerja organisasi. Ketiga, pemahaman informan mencakup peran kelompok dan koordinasi dalam mencapai tujuan bersama. Ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya bekerja sama secara tim dan memiliki koordinasi yang baik antara anggota pemerintah desa. Poin ini menggambarkan bahwa kerja sama tidak hanya bersifat internal di antara staf pemerintahan, tetapi juga melibatkan interaksi yang efektif antar unit.

Keempat, keterlibatan masyarakat dan pendekatan musyawarah menonjol dalam konteks kerja sama. Informan menyoroti bahwa proses musyawarah digunakan untuk menjawab permintaan masyarakat, menegaskan bahwa keputusan diambil secara partisipatif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Terakhir, peran elemen-elemen pemerintah desa, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), diakui dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini mencerminkan nilai-nilai demokratis dan partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, di mana semua elemen terlibat dalam pembahasan dan penetapan kebijakan. Dengan demikian, jawaban informan menciptakan gambaran holistik tentang bagaimana kerja sama dan budaya organisasi diimplementasikan dalam konteks pemerintahan desa, membawa nilai-nilai partisipatif, koordinatif, dan pembelajaran bersama sebagai fondasi

utama dalam membangun efektivitas pemerintahan desa di Kalurahan Widodomartani.

Dalam wawancara dengan Ibu Suarni selaku tokoh lembaga masyarakat, ia mengatakan bahwa:

Kalau dari saya, selama ini kerja sama itu yang menjadi tujuan kami bersama untuk memajukan kalurahan kami. Kalau tanpa ada kerja sama mungkin belum pernah maju. Tapi mas lihat saja sudah 4 tahun terakhir kemajuan desa kami baik dari infrastruktur maupun peningkatan ekonomi sudah sangat bagus nanti cek sendiri data pendapatan kami. Itu sudah sangat bagus. Nah itu semua dari hasil kerja sama antara elemen demi menciptakan pemerintah yang baik atau yang ditanyakan tapi terkait budaya organisasi. (Wawancara, tanggal 29 Januari 2024)

Dalam analisis jawaban informan tersebut, beberapa aspek kunci dapat diidentifikasi berdasarkan kerangka konseptual yang telah diberikan: *Pertama*, informan menyatakan bahwa kerja sama di antara elemen pemerintah kalurahan menjadi tujuan bersama untuk memajukan kalurahan. Pernyataan ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya kolaborasi dan sinergi dalam mencapai kemajuan. Selain itu, fokus pada "memajukan kalurahan" menunjukkan bahwa kerja sama dipandang sebagai sarana untuk mencapai perkembangan positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat setempat. *Kedua*, informan menyoroti hasil konkret dari kerja sama tersebut, seperti kemajuan dalam infrastruktur dan peningkatan ekonomi selama empat tahun terakhir. Hal ini memberikan bukti empiris bahwa kerja sama antarelemen pemerintah kalurahan telah memberikan dampak positif yang terukur bagi masyarakat setempat. Data pendapatan yang disebutkan sebagai indikator kemajuan memberikan gambaran nyata tentang hasil nyata dari upaya kerja sama.

Ketiga, informan menegaskan pentingnya evaluasi dan pengukuran hasil. Dengan mengundang untuk "nantu cek sendiri data pendapatan kami," informan menunjukkan keterbukaan terhadap verifikasi dan transparansi. Ini mencerminkan prinsip-prinsip akuntabilitas yang merupakan bagian dari budaya organisasi yang baik. *Keempat*, walaupun jawaban informan lebih menekankan pada hasil konkret, tetapi terdapat implikasi bahwa budaya organisasi yang baik berkontribusi pada tercapainya tujuan bersama. Meskipun informan tidak secara eksplisit membahas elemen-elemen khusus dari budaya organisasi, namun kesuksesan dalam mencapai hasil kemajuan tersebut dapat dianggap sebagai hasil dari norma-norma dan nilai-nilai yang mendukung kerja sama. *Kelima*, fokus pada keberlanjutan kemajuan selama empat tahun terakhir juga menunjukkan bahwa kerja sama dan budaya organisasi yang baik perlu dipertahankan dan dikelola secara berkelanjutan untuk mencapai dampak yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, jawaban informan memberikan pandangan positif tentang efektivitas kerja sama antareleman pemerintah kalurahan dan implikasinya terhadap kemajuan kalurahan. Analisis ini memberikan gambaran bahwa kerja sama dan budaya organisasi yang baik dapat menjadi pilar utama dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab ini, peneliti akan membahas tentang kesimpulan dari penelitian ini yang terbagi dalam beberapa poin yang menggambarkan keadaan umum di Kalurahan Widodomartani yang berkaitan dengan budaya organisasi terhadap kinerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah. Hal-hal yang disimpulkan berkaitan langsung dengan permasalahan yang terjadi di Kalurahan Widodomartani terkait dengan budaya organisasi untuk kemudian diberikan saran sebagai masukan untuk pemerintah Kalurahan Widodomartani.

Pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi “angin segar” bagi desa/kalurahan, di mana diharapkan pemerintah kalurahan dapat mengatur urusan kalurahannya dengan lebih baik dan mandiri. Pasal 26 ayat 2, menekankan bahwa pemerintah kalurahan memiliki wewenang untuk mengatur, membina dan memimpin kalurahan agar dapat mensejahterakan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pemerintah kalurahan telah bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam mengelola segala anggaran kalurahan dan juga pengawasan yang intens dalam menjalankan undang-undang ini baik dari pemerintah daerah setempat dan juga dari masyarakat kalurahan, agar penggunaan dana alokasi dapat teralokasikan dengan baik dan dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat kalurahan.

Kedua, Pemerintah kalurahan, sebagai pelaksana Undang-Undang Desa, memiliki tanggung jawab yang kompleks, mencakup pemastian pelayanan

publik yang efisien, transparan, dan akuntabel, serta pengelolaan anggaran kalurahan. Budaya organisasi di pemerintah Kalurahan Widodomartani sudah berjalan sesuai dengan apa yang digambarkan melalui Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Hal ini menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan tugas tersebut. Sebagai entitas hidup, budaya organisasi mencerminkan nilai-nilai, norma, dan perilaku yang membentuk cara kerja dan interaksi antar anggota pemerintahan kalurahan.

Ketiga, terdapat beberap permasalahan yang terkait dengan budaya organisasi di mana terdapat beberapa anggota yang masih sulit bekerja sama di tataran pemerintah desa sehingga belum mampu meningkatkan pentingnya budaya organisasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Hal ini terjadi karena adanya cemburu sosial dan juga alasan seperti ketidaksukaan satu anggota dengan anggota yang lain sehingga menimbulkan budaya individualitas dalam proses meningkatkan budaya organisasi terhadap kinerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah.

Keempat, Penyelenggaraan pemerintahan di Kalurahan Widodomartani tidak hanya tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, tetapi juga melibatkan penerapan nilai-nilai dalam budaya organisasi. Aspek-aspek seperti komunikasi, koordinasi, pengelolaan sumber daya, pengawasan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk budaya organisasi yang kuat. Dalam konteks ini, para informan menyoroti bahwa penyelenggaraan pemerintahan memberikan wadah untuk

menerapkan nilai-nilai seperti transparansi, tanggung jawab, dan partisipasi dalam budaya organisasi.

Kelima, kerja sama yang dibangun oleh pemerintah Kalurahan Widodomartani sudah sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan pemahaman para informan terkait dengan budaya organisasi dan perlunya kerja sama dalam sebuah organisasi yakni pemerintah desa. Oleh karena itu, kinerja pemerintah desa dapat diukur dari bagaimana terbangunnya kerja sama yang baik dalam meningkatkan budaya organisasi di Kalurahan Widodomartani.

Terakhir, pemerintah desa dilihat sebagai organisasi yang memerlukan budaya organisasi yang baik untuk mencapai tujuan dan tugasnya. Implementasi budaya organisasi yang positif adalah kunci utama untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Kesimpulan ini memberikan wawasan bagi pengembangan praktik dan kebijakan bagi Kalurahan Widodomartani dalam meningkatkan budaya organisasi yang baik dan pelayanan masyarakat yang efisien.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan kepada pemerintah Kalurahan Widodomartani beserta seluruh elemennya:

1. Pemerintah Kalurahan Widodomartani perlu membangun kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan pengelolaan desa. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, dialog terbuka, dan pelibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan

pengelolaan anggaran dan penyelenggaraan pelayanan publik yang ada di Kalurahan Widodomartani.

2. Pemerintah Kalurahan Widodomartani harus mendorong budaya kolaboratif untuk mengatasi permasalahan individualitas dalam budaya organisasi dan perlu ditekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi antara anggota pemerintah Kalurahan (Desa), dalam hal ini para kaur dan kasi dalam membangun budaya organisasi yang baik. Langkah-langkah konkret seperti pelatihan kepemimpinan, team-building, dan pembinaan hubungan antarpersonil dapat membantu memperkuat kerja sama dalam tim.
3. Pemerintah Kalurahan perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pengambilan keputusan. Masyarakat harus diberi akses yang lebih luas terhadap informasi terkait anggaran dan program-program Pembangunan Kalurahan. Audit internal yang rutin juga diperlukan untuk memastikan akuntabilitas penggunaan dana desa sebagaimana yang telah dikatakan oleh beberapa informan terkait dengan transparansi dan pembuatan peraturan Kalurahan.
4. Pemerintah Kalurahan Widodomartani harus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi budaya organisasi dan kinerja pemerintah desa. Hal ini penting untuk mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang telah diambil.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hairi, Muhammad Rizal, and Syahrani Syahrani. "Budaya Organisasi dan Dampaknya Terhadap Lembaga Pendidikan." *Adiba: Journal of Education* 1.1 (2021): 79-87.
- Dunggio, Swastiani. "Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Camat Duingi Kota Gorontalo." *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik* 7.1 (2020): 1-9.
- Fadlilah, Nihayatul, et al. "Studi Kausal Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan." *Journal of Economics and Management (JECMA)* 1.1 (2019): 66-71.
- Fauzan, Ahmad, et al. "Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai dimediasi oleh Komitmen Organisasi." *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)* 6.1 (2023): 517-534.
- Hendra, Hendra. "Pengaruh Budaya Organisasi, Pelatihan Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Universitas Tjut Nyak Dhien Medan." *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen* 3.1 (2020): 1-12.
- Maharani, Intan, and Suryono Efendi. "Pengaruh Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi, Kompensasi, Dan Etos Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia." *Oikonomia: Jurnal Manajemen* 13.2 (2019).
- Noor, Firman Syah. "Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Budaya Organisasi Terhadap Motivasi Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Pegawai Pengadilan Negeri Jambi." *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 12.1 (2021): 41-48.
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa
- Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
- Praditya, Rayyan Aqila. "Peran Mediasi Budaya Organisasi dalam Hubungan antara Kepemimpinan Transformasional dan Efektivitas Organisasi: A Mini Review." *International Journal Of Social, Policy And Law* 3.1 (2022): 29-34.

- Sugiono, Edi, and Gloria Ida Lumban Tobing. "Analisis Pengaruh Kepemimpinan, Budaya Organisasi dan Komunikasi Terhadap Kepuasan Kerja Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Karyawan." *Jurnal Manajemen Strategi Dan Aplikasi Bisnis* 4.2 (2021): 389-400.
- Sulaksono, Hari. *Budaya organisasi dan kinerja*. Deepublish, 2015.
- Tamimi, Muhizan, et al. "Budaya Organisasi dan Kinerja Karyawan: A Systematic Literature Review." *Husnayain Business Review* 2.2 (2022): 11-21.
- Yanto, Anas Tri, and Jaenab Jaenab. "Pengaruh budaya organisasi terhadap komitmen organisasi pada pegawai kantor camat." *JIM UPB (Jurnal Ilmiah Manajemen Universitas Putera Batam)* 8.2 (2020): 110-114.
- Yuningsih, Ani. "Membangun dan Menyosialisasikan Budaya Organisasi sebagai Keunggulan Kompetitif." *Mediator: Jurnal Komunikasi* 5.1 (2004): 111-123.
- Yuwono, Yutdi. *Pengaruh Budaya Organisasi, Pengendalian Internal, Peran Audit Internal Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud)(Studi Empiris pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota dan Kab. Magelang)*. Diss. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018.
- Achmad Sobirin. 2007. *Budaya Organisasi Pengertian, Makna dan Aplikasinya Dalam Kehidupan Organisasi*. Yogyakarta : IBPP STIM YKPN.
- Pace 1998 : Konsep budaya organisasi jurnal Universitas Padjadran.
<https://jurnal.unpad.ac.id>
- Singarimbun (2003 Universitas Lampung (UNILA) Metode Penelitian Eksplanasi.
<http://digilib.unila.ac.id>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN
PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pengaruh budaya organisasi organisasi terhadap kinerja pemerintah kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan?
2. Bagaimana budaya organisasi menjadi dasar yang penting bagi kinerja pemerintah kalurahan?
3. Bagaimana penyelenggaraan pemerintah di kalurahan yang berdasar pada budaya organisasi?
4. Bagaimana kerja sama seluruh elemen pemerintah kalurahan dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan budaya organisasi?
5. Bagaimana peningkatan kinerja pemerintah kalurahan yang dikerjakan sesuai deng budaya organisasi?
6. Bagaimana dampak budaya organisasi terhadap kinerja pemerintah kalurahan yang berlangsung selama ini?
7. Bagaimana tanggapan setiap anggota pemerintah kalurahan terhadap kinerja pemerintah kalurahan secara keseluruhan?
8. Siapa pemeran kunci dalam mengendalikan budaya organisasi dalam dalam penyelenggaraan pemerintah kalurahan?
9. Bagaimana respon kepala kalurahan terjait dengan kinerja anggotanya dalam penyelenggaraan pemerintah kalurahan?
10. Bagaimana hasil dari evaluasi budaya organisasi terhadap kinerja pemerintah kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintah?

11. Sejauh ini, bagaimana partisipasi masyarakat dalam menilai budaya organisasi di kalurahan?
12. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kinerja pemerintah kalurahan?
13. Apa saja dampak positif dari penyelenggaraan pemerintah kalurahan berbasis budaya organisasi?
14. Bagaimana kelanjutan dalam proses peningkatan kinerja pemerintah kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintah?
15. Apa saja dampak paling konkrit yang didapatkan masyarakat dari kinerja pemerintah kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintah?
16. Bagaimana kerja sama antara pemerintah kalurahan dan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintah?
17. Bagaimana pemerintah kalurahan menyikapi tantangan dan permasalahan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintah?
18. Sejauh ini, maslaha apa saja yang paling urgen dalam proses penyelenggaraan pemerintah?
19. Bagaimana kehadiran pemerintah kalurahan sebagai sebuah organisasi yang mampu memberikan manfaat kinerja dalam melayani masyarakat?
20. Bagaimana perekrutan pemerintah kalurahan dalam meningkatkan kinerja yang baik dari setiap anggota organisasi pemerintah kalurahan?

Dokumentasi foto-foto wawancara dengan informan selama penelitian.



Wawancara bersama Lurah Widodomartani,
Heruyuno,S.T pada tanggal 29 Januari 2024



Wawancara bersama Carik Widodomartani,
Taufiq Wahyu Widodo,SH pada tanggal 29 Januari 2024



Wawancara berasama Kamitua Widodomartani,
Susilo Widodo, SSi pada tanggal 29 Januari 2024



Wawancara berasama Suarmi Warga Masyarakat Widodomartani,
pada tanggal 29 Januari 2024

Tabel
Penggunaan Dana Desa Widodomartani

Nomor	Penggunaan Dana Desa	Jumlah
1.	Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	11.110.000
2.	Penyelenggaraan musyawarah, perencanaan desa/pembahasan APBDes (reguler)	17.090.000
3.	Koordinasi/kerja sama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa	28.490.000
4.	Pembangunan peningkatan sarana prasarana TK	18.000.000
5.	Pengelolaan perpustakaan milik desa	16.580.000
6.	Penyelenggaraan pos kesehatan milik desa	13.700.000
7.	Penyelenggaraan posyandu	67.724.000
8.	Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan	20.674.000
9.	Penyelenggaraan desa siaga kesehatan	9.734.000
10.	Fasilitasi kegiatan bidang kesehatan	11.580.000
11.	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan	151.860.000
12.	Pembangunan jalan desa	48.240.000
13.	Pelaksanaan program kali bersih	9.550.000
14.	Fasilitasi/pendampingan bulan bakti gotong royong	9.680.000
15.	Fasilitasi/pendamping dan penyuluhan pengurus tempat ibadah	46.710.000
16.	Pelaksanaan gelar potensi desa	9.120.000
17.	Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga	16.820.000
18.	Pembinaan karang taruna	16.220.000
19.	Pembinaan TKK	23.978.000
20.	Pembentukan dan pembinaan kader pemberdayaan masyarakat desa	9.514.000
21.	Pemberdayaan/pembinaan dan pemberian stimulan bagi lembaga non pemerintah (PAUD)	26.464.000
22.	Pemberdayaan/pembinaan dan pemberian stimulan kegiatan warga masyarakat desa	41.520.000
23.	Pemberdayaan/pembinaan dan pemberian stimulan bagi kelompok masyarakat	29.384.000
24.	Pelatihan budi daya perikanan	9.130.000
25.	Pembangunan/rehabilitas saluran irigasi tersier	63.240.000

Nomor	Penggunaan Dana Desa	Jumlah
26.	Pembinaan dan pelatihan kelompok tani	18. 650. 000
27.	Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	10. 638. 000
28.	Pelatihan dan penguatan penyandang difabel	10. 224. 000
29.	Pendapatan/pemberdayaan keluarga miskin, rentan dan difabel	20. 420. 000
30.	Fasilitasi/pendampingan desa ramah anak	10. 434. 000
31.	Fasilitasi program penanggulangan kemiskinan tingkat desa	40. 234. 000
32.	Pelatihan manajemen koperasi	18. 740. 000
33.	Pelatihan pengelolaan BUMKAL	6. 642. 000
34.	Pengelolaan pasar desa	12. 320. 000
35.	BLT Dana Desa	115. 200. 000
36.	Total Penggunaan dana desa	989. 614. 000

Sumber: APBKAL Kalurahan Widodomartani